KAJIAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Studi Khusus
Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan



Bappeda-Litbang
Provinsi Kalimantan Utara

Universitas Kaltara

KAJIAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Studi Khusus
Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan



Bappeda-Litbang
Provinsi Kalimantan Utara

Universitas Kaltara

KATA PENGANTAR

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang dapat digunakan sebagai dasar merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Indikator ini penting karena melalui IPM dapat diketahui sejauh mana keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

Saat ini, status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Utara termasuk dalam kategori "tinggi". Namun, masih ada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan capaian pembangunan manusia berstatus "sedang". Laporan akhir Kajian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara (Studi Khusus Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan) menyajikan gambaran umum dan perkembangan IPM di kedua kabupaten tersebut, dilengkapi *issue-issue* dan simulasi target dalam pembangunan manusia.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan akhir ini. Kritik dan saran yang membangun juga kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini di kemudian hari. Semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat, baik untuk pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat luas.

Tanjung Selor, Desember 2022
Plt. Kepala Bappeda Litbang
Provinsi Kalimantan Utara

Ir. Helmi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... iii
Daftar Isi..... v
Daftar Tabel..... vi
Daftar Gambar..... vii

BAB I
Pendahuluan..... 1
BAB II
Konsep Pembangunan Manusia..... 9
BAB III
Pembangungan Manusia di Provinsi Kalimantan Utara..... 21
BAB IV
Pembangungan Manusia di Kabupaten Tana Tidung..... 35
BAB V
Pembangungan Manusia di Kabupaten Nunukan..... 67
BAB VI
Kesimpulan dan Rekomendasi..... 101

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Statistik Iklim Kabupaten Tana Tidung, 2021.....	39
Tabel 4.2	Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, 2021.....	42
Tabel 4.3	Beberapa Indikator Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, 2020-2021.....	46
Tabel 4.4	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tana Tidung, 2020-2021.....	48
Tabel 4.5	Beberapa Indikator Pendidikan Kabupaten Tana Tidung, 2020-2021.....	51
Tabel 4.6	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, Tahun Ajaran 2021/2022.....	53
Tabel 4.7	Estimasi Target IPM Kabupaten Tana Tidung, 2023-2026...	62
Tabel 4.8	Estimasi Target IPM Kabupaten Tana Tidung beserta Komponennya, 2023-2026.....	65
Tabel 5.1	Statistik Iklim Kabupaten Nunukan, 2021.....	71
Tabel 5.2	Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan, 2021.....	75
Tabel 5.3	Beberapa Indikator Kesehatan Kabupaten Nunukan, 2020-2021.....	79
Tabel 5.4	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Nunukan, 2020-2021.....	81
Tabel 5.5	Beberapa Indikator Pendidikan Kabupaten Nunukan, 2020-2021.....	85
Tabel 5.6	Jumlah Sekolah dan Rasio Murid-Guru Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan, Tahun Ajaran 2021/2022.....	85
Tabel 5.7	Jumlah Guru dan Murid Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan, Tahun Ajaran 2021/2022.....	87
Tabel 5.8	Estimasi Target IPM Kabupaten Nunukan, 2023-2026.....	96
Tabel 5.9	Estimasi Target IPM Kabupaten Nunukan beserta Komponennya, 2023-2026.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP	13
Gambar 2.2	Perbedaan Penghitungan IPM dengan Metode Lama dan Metode Baru di Indonesia	13
Gambar 3.1	IPM Provinsi Kalimantan Utara, 2013-2022	23
Gambar 3.2	Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Utara (tahun), 2013-2022	25
Gambar 3.3	Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Kalimantan Utara (tahun), 2013-2022	26
Gambar 3.4	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Utara (tahun), 2013-2022	27
Gambar 3.5	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan Provinsi Kalimantan Utara (ribu rupiah), 2013-2022	28
Gambar 3.6	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2022	29
Gambar 3.7	UHH Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara (tahun), 2022	30
Gambar 3.8	HLS dan RLS Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara (tahun), 2022	31
Gambar 3.9	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara (ribu rupiah), 2022	31
Gambar 3.10	Status IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2022	32
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Tana Tidung	37
Gambar 4.2	Persentase Luas Wilayah Kecamatan terhadap Luas Kabupaten Tana Tidung	38
Gambar 4.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung, 2020-2021	40
Gambar 4.4	Piramida Penduduk Kabupaten Tana Tidung, 2021	41
Gambar 4.5	IPM Kabupaten Tana Tidung, 2013-2022	43
Gambar 4.6	Umur Harapan Hidup Kabupaten Tana Tidung (tahun), 2013-2022	45
Gambar 4.7	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tana Tidung (tahun), 2013-2022	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.8 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Tidung (tahun), 2013-2022 50
Gambar 4.9 Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Tana Tidung (ribu rupiah), 2013-2022 55
Gambar 4.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (persen) di Kabupaten Tana Tidung, 2017-2021 56
Gambar 4.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Kabupaten Tana Tidung, 2017-2021 57
Gambar 4.12 Pertumbuhan IPM Kabupaten Tana Tidung (persen), 2014-2022 61
Gambar 4.13 Indeks Indikator Komponen IPM Kabupaten Tana Tidung, 2022 63
Gambar 5.1 Peta Kabupaten Nunukan 69
Gambar 5.2 Luas Wilayah Kabupaten Nunukan Menurut Kecamatan (km^2), 2021 70
Gambar 5.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Nunukan, 2020-2021 72
Gambar 5.4 Piramida Penduduk Kabupaten Nunukan, 2021 73
Gambar 5.5 IPM Kabupaten Nunukan, 2013-2022 76
Gambar 5.6 Umur Harapan Hidup Kabupaten Nunukan (tahun), 2013-2022 78
Gambar 5.7 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Nunukan (tahun), 2013-2022 83
Gambar 5.8 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nunukan (tahun), 2013-2022 84
Gambar 5.9 Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Nunukan (ribu rupiah), 2013-2022 90
Gambar 5.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (persen) di Kabupaten Nunukan, 2017-2021 91
Gambar 5.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Kabupaten Nunukan, 2017-2021 92
Gambar 5.12 Pertumbuhan IPM Kabupaten Nunukan (persen), 2014-2022 95
Gambar 5.13 Indeks Indikator Komponen IPM Kabupaten Nunukan, 2022 98

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini menegaskan pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, sekaligus merupakan input pembangunan. Menganggap manusia sebagai aset bangsa yang sesungghnya dan menciptakan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan menjadi ide dasar pembangunan manusia.

UNDP mulai memperkenalkan IPM pada tahun 1990. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Saat itu, IPM dibentuk dari empat indikator yang merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Keempat indikator tersebut adalah angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, gabungan angka partisipasi kasar, dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

IPM terus menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia sejak pertama kali diperkenalkan oleh *UNDP*. Berbagai negara turut mengadopsi konsep pembangunan manusia yang digagas *UNDP*. Di Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Saat ini, indikator yang digunakan di Indonesia dalam menghitung IPM adalah umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia tujuh tahun ke atas, rata-rata

lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. *UNDP* membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah ke dalam empat golongan yaitu rendah (IPM<60), sedang (60≤IPM<70), tinggi (70≤IPM<80), dan sangat tinggi (IPM≥80). Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, dapat dilihat dari dua aspek, yaitu **kecepatan dan status IPM**.

Secara umum, pembangunan manusia Kalimantan Utara terus mengalami kemajuan. Walaupun sempat mengalami penurunan pada 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, IPM Kalimantan Utara mulai kembali membaik sejak tahun 2021 hingga saat ini seiring dengan pemulihan kinerja ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19 yang baik. Selama 2013-2022 IPM Kalimantan Utara telah meningkat 5,65 persen, dari 67,99 pada 2013 menjadi 71,83 pada 2022. Sejak tahun 2018, status pembangunan manusia di Kalimantan Utara meningkat dari level “sedang” ke level “tinggi”.

Terus membaiknya pembangunan manusia merupakan capaian yang cukup baik bagi Provinsi Kalimantan Utara. Walaupun demikian, jika diamati lebih rinci pada tingkat kabupaten/kota, masih ada kabupaten/kota yang pembangunan manusianya masih berada pada level “sedang”, yaitu Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Utara, IPM Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan merupakan dua yang terrendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Utara. Meskipun IPM kabupaten/kota tersebut juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun kenaikannya belum mampu untuk meningkatkan

level IPM dari “sedang” menjadi “tinggi” dan mengejar ketertinggalannya dari kabupaten/kota lain. Sementara itu, kabupaten/kota lain juga terus melakukan upaya untuk peningkatan IPM pada kabupaten/kota masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan simulasi yang tepat untuk percepatan peningkatan IPM, khususnya di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan.

1.2 Tujuan

Tujuan pada Kajian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara (Studi Khusus Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan) adalah:

1. Memberikan gambaran tentang capaian pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Utara, serta di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan sebagai wilayah yang capaian IPMnya masih pada kategori sedang.
2. Mengidentifikasi *issue-issue* dan mengevaluasi pembangunan manusia di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan pada tiga dimensi pembentuk IPM, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak.

1.3 Sasaran

Sasaran pada Kajian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara (Studi Khusus Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan) adalah:

1. Tersedianya gambaran tentang capaian pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Utara, utamanya di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan.
2. Tersusunnya hasil identifikasi (perkembangan, *issue-issue*, dan evaluasi, serta simulasi penentuan target) pembangunan manusia di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan pada tiga dimensi penyusun IPM, yaitu dimensi Kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak.

1.4 Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyusunan Kajian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara (Studi Khusus Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan) adalah:

1. Penyusunan laporan pendahuluan kegiatan, yang disampaikan dalam seminar pendahuluan guna mendapatkan masukan, saran dari peserta seminar.
2. *Indepth Study* dengan melakukan wawancara pada sejumlah *stakeholder* untuk mendapatkan dan menggali informasi tentang issue, program, kegiatan serta menemukenali permasalahan pembangunan manusia secara rinci.
3. Penyusunan laporan akhir sebagai bahan pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilaksanakan

1.5 Manfaat Hasil Kegiatan

Manfaat penyusunan Kajian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara (Studi Khusus Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten

Nunukan) adalah sebagai bahan masukan/input untuk para pengambil kebijakan dalam upaya percepatan peningkatan IPM, khususnya di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan. Selain itu, adanya kajian khusus pada dua wilayah dengan IPM kategori sedang yang dapat ditingkatkan menjadi kategori tinggi, menjadi pengungkit utama dalam peningkatan IPM Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA



2.1 Pembangunan Manusia dari Waktu ke Waktu

Pada era 1960-1970, pelaksanaan pembangunan selalu ditekankan pada pertumbuhan ekonomi (paradigma pembangunan). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diyakini akan membawa kemajuan pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi rata-rata lima persen per tahun untuk jangka panjang dipandang sebagai keberhasilan pembangunan. Sayangnya, penerapan paradigma pertumbuhan ini justru memunculkan berbagai masalah, antara lain kemiskinan dan pengangguran. Teori *trickle down effect* yang sebelumnya diharapkan mampu mengantisipasi masalah tersebut ternyata tidak bekerja. Manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjangkau semua kalangan dan justru meningkatkan kesenjangan.

Adanya berbagai masalah yang timbul selanjutnya melahirkan paradigma baru, yaitu paradigma kesejahteraan. Walaupun demikian, dalam penerapannya, masih terdapat persoalan-persoalan yang berdampak pada masalah ketidakadilan dan ketidakterpaduan pembangunan.

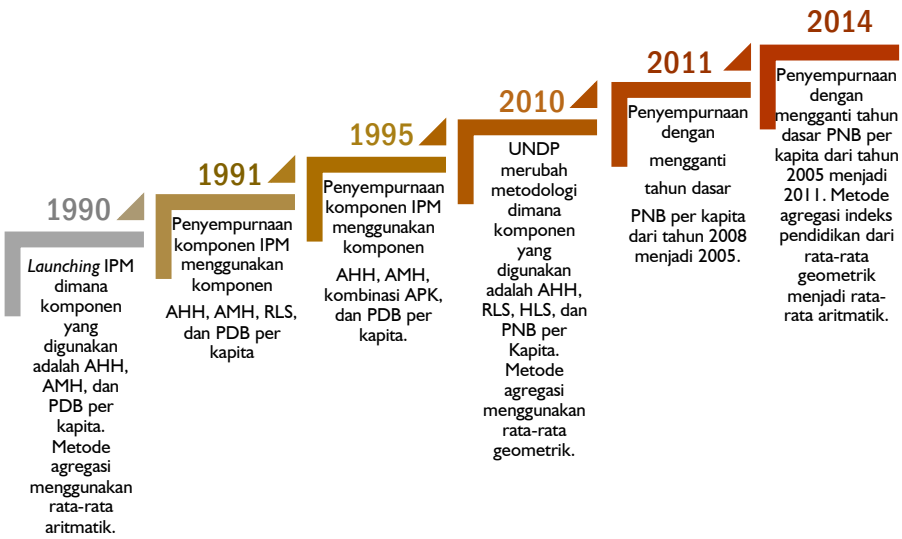
Berkaca dari pemikiran-pemikiran sebelumnya, berkembanglah konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan pendekatan pembangunan manusia. UNDP dalam *Human Development Report 1990* menyebutkan bahwa *m*anusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini menegaskan pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, sekaligus merupakan input pembangunan. Menganggap manusia sebagai aset bangsa yang sesungghnya dan menciptakan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan menjadi ide dasar pembangunan manusia.

Konsep inilah yang mendasari dibentuknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

UNDP mulai memperkenalkan IPM pada tahun 1990. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Saat itu, IPM dibentuk dari empat indikator yang merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Keempat indikator tersebut adalah angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, gabungan angka partisipasi kasar, dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Sejak saat itu, IPM secara berkala dipublikasikan setiap tahun dalam suatu Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*).

IPM terus menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia sejak pertama kali diperkenalkan oleh *UNDP*. Berbagai negara, termasuk Indonesia, turut mengadopsi konsep pembangunan manusia yang digagas *UNDP*. Indonesia menghitung IPM untuk pertama kalinya pada tahun 1996. Awalnya, penghitungan IPM dilakukan secara berkala setiap tiga tahun. Namun, sejak 2004, IPM dihitung setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator yang digunakan di Indonesia dalam menghitung IPM saat itu adalah angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.

Gambar 2.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP



Catatan:

AHH : Angka Harapan Hidup Saat Lahir

AMH : Angka Melek Huruf

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

HLS : Harapan Lama Sekolah

APK : Angka Partisipasi Kasar

PDB : Produk Domestik Bruto

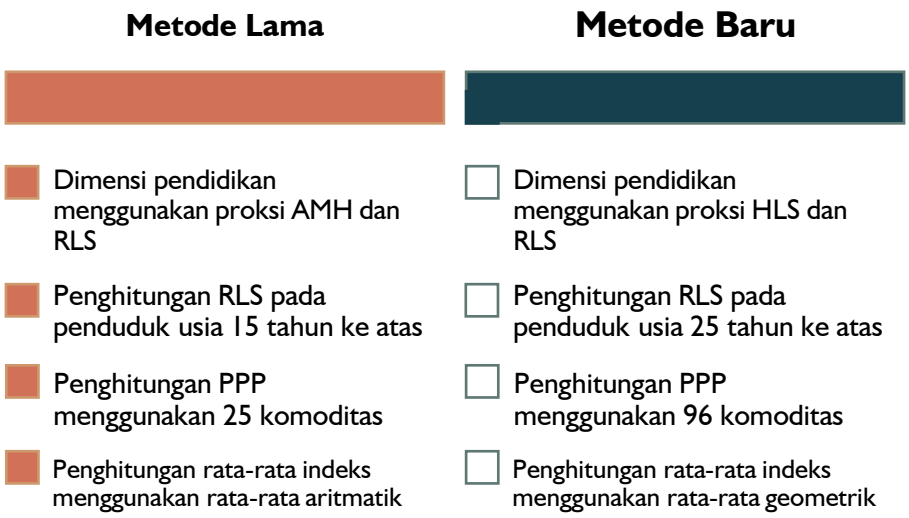
PNB : Produk Nasional Bruto

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan pembangunan, *UNDP* mengembangkan gagasan baru dalam penghitungan pembangunan manusia. Pada tahun 2010, *UNDP* secara resmi memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode yang baru. Metode ini menggunakan indikator baru dalam penghitungan IPM.

Indikator angka melek huruf dan gabungan angka partisipasi kasar diganti dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indikator PDB per kapita juga diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, penghitungan rata-rata indeks juga diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Perubahan pada metode IPM didasarkan pada dua hal mendasar. Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antarwilayah dengan baik. Selanjutnya adalah indikator PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun, disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi dan apabila ada investasi dari asing turut diperhitungkan. Padahal, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati penduduk lokal. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau bahkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Gambar 2.2
Perbedaan Penghitungan IPM dengan Metode Lama dan Metode Baru di Indonesia



Indonesia mulai mengaplikasikan penghitungan IPM dengan metode baru pada tahun 2014. Sejak saat itu, Indonesia telah meninggalkan penghitungan IPM dengan metode lama. Indikator yang digunakan di Indonesia sama dengan *UNDP*, kecuali PNB per kapita. Indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan.

2.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

2. IPM menjadi salah satu indikator target pembangunan pemerintah.
3. IPM digunakan sebaga salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum.

2.3. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Menurut *UNDP*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup saat lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

2.3.1 Umur Harapan Hidup Saat Lahir

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan umur harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack*

digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussell* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya. Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar *UNDP*, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks adalah 85 tahun dan terendah sebagai batas bawah adalah 20 tahun.

2.3.2 Pengetahuan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan yang menjadi salah satu komponen pembentuk IPM. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan *UNDP*. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimum 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat

dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan *UNDP*. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

2.3.3 Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. *UNDP* mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*) berbasis formula Rao.

2.4 Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

Indeks Kesehatan

$$I_{Kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

Indeks Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLSS_{min}}$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Indeks Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam tabel berikut.

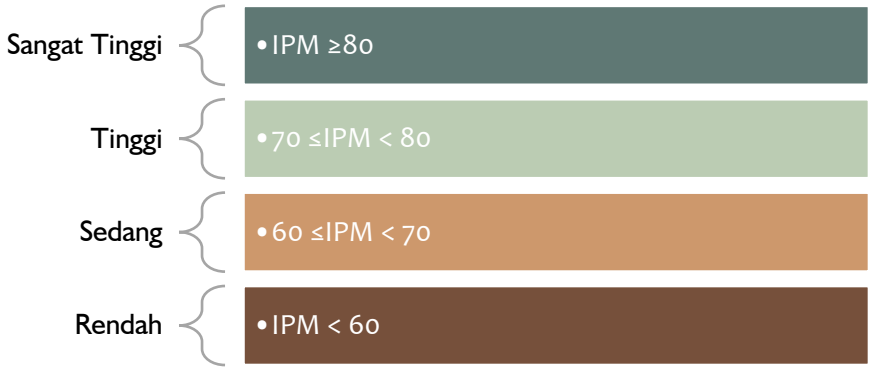
Komponen	Satuan	Min	Max
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH_0)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rupiah	1 007 436	26 572 352

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \text{ x } 100$$

2.5 Status Pembangunan Manusia

IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. *UNDP* membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah ke dalam empat golongan yaitu sebagai berikut:


Sangat Tinggi
• IPM ≥80
Tinggi
• 70 ≤IPM < 80
Sedang
• 60 ≤IPM < 70
Rendah
• IPM < 60

BAB III

PEMBANGUNAN MANUSIA DI KALIMANTANTAN UTARA

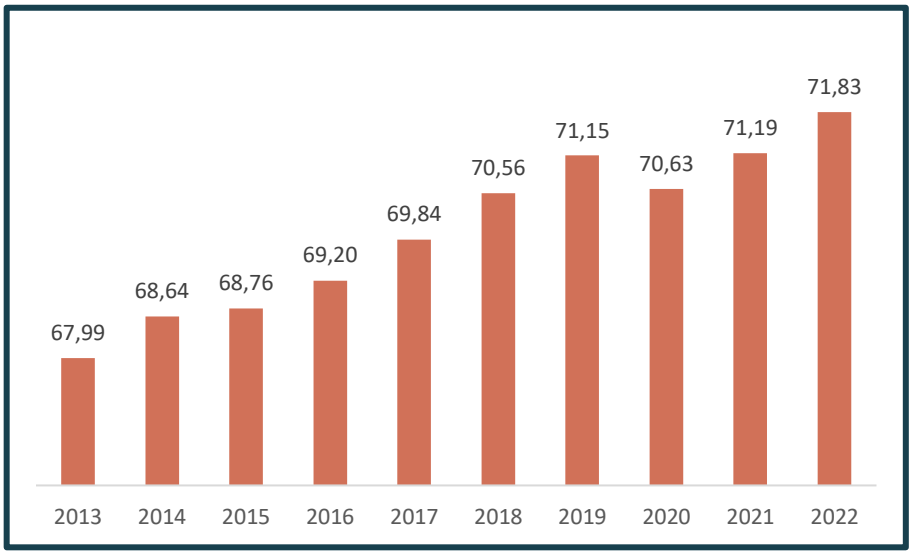


3.1 Perkembangan Pembangunan Manusia Kalimantan Utara

Sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, perkembangan IPM selalu dicatat dari tahun ke tahun. Sehingga analisis mengenai kondisi pembangunan manusia dapat dilakukan dengan dua perspektif yakni mencermati capaian di satu titik tahun tertentu dan menelaah lebih jauh perkembangan capaian antar waktu.

Secara umum, pembangunan manusia Kalimantan Utara terus mengalami kemajuan. Walaupun sempat mengalami penurunan pada 2020 akibat terdampak pandemi COVID-19, IPM Kalimantan Utara kembali menunjukkan peningkatan mulai tahun 2021. Hal ini seiring dengan pemulihan kinerja perekonomian dan penanganan pandemi COVID-19 yang berjalan baik.

Gambar 3.1 IPM Provinsi Kalimantan Utara, 2013-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada kondisi normal (2013-2019), pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Utara secara rata-rata tumbuh 0,76 persen per tahun, dari 67,99 pada 2013 menjadi 71,83 pada 2019. Ketika virus COVID-19 mulai masuk, IPM Kalimantan Utara turun hingga 0,73 persen menjadi 70,56. Selanjutnya, di masa pemulihan ekonomi tahun 2021, IPM Kalimantan Utara terus tumbuh hingga kini pada tahun 2022 mencapai 71,83. IPM Kalimantan Utara tumbuh 0,9 persen pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan IPM pada kondisi normal sebelum pandemi COVID-19.

Dengan capaian IPM tahun 2022, status pembagunan manusia di Kalimantan Utara masih tetap berada di level “tinggi”. Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, IPM Kalimantan Utara berada pada urutan ke-21, naik 1 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.

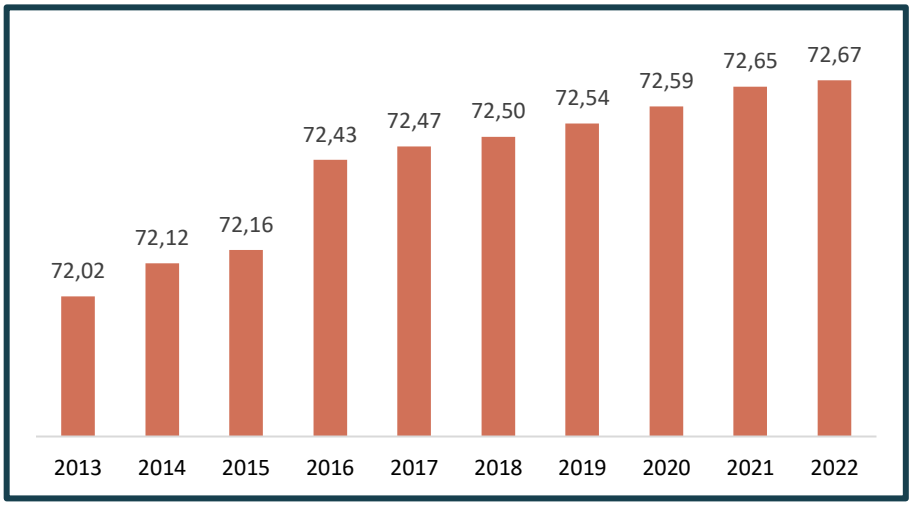
Membaiknya pembangunan manusia di Kalimantan Utara didukung dengan peningkatan pada seluruh komponen penyusunnya, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan.

UHH Provinsi Kalimantan Utara terus menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2013-2022. Rata-rata pertumbuhan UHH pada periode tersebut sebesar 0,10 persen per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara semakin membaik. Bayi yang baru lahir memiliki harapan untuk hidup lebih lama.

UHH Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 mencapai 72,67 tahun. Dengan demikian, penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang lahir pada tahun 2022 memiliki peluang hidup hingga usia 72 tahun 8 bulan. UHH

Provinsi Kalimantan Utara terbilang cukup tinggi, bahkan telah melampaui UHH nasional yang hanya 71,85 tahun.

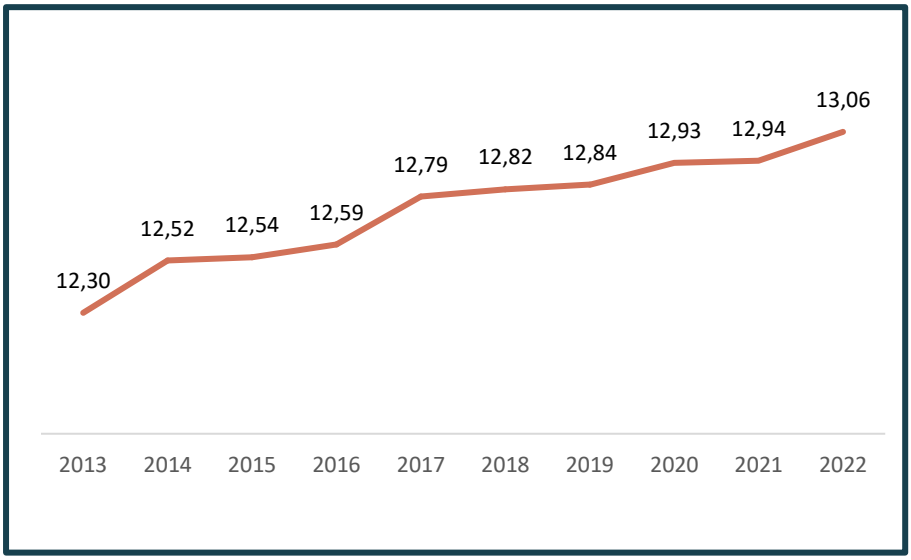
Gambar 3.2 Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Utara (tahun), 2013-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Penghitungan HLS mencakup pendidikan untuk penduduk yang berusia mulai dari tujuh tahun ke atas, sementara penghitungan RLS mencakup rata-rata lama sekolah dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk meninjau keberhasilan program pendidikan dalam jangka waktu pendek, sedangkan dalam jangka panjang, dapat dilihat dari angka RLS. Angka HLS dan RLS dapat memberikan gambaran tentang capaian dan penambahan sumber daya manusia berkualitas pada suatu daerah.

Gambar 3.3 Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Kalimantan Utara (tahun), 2013-2022



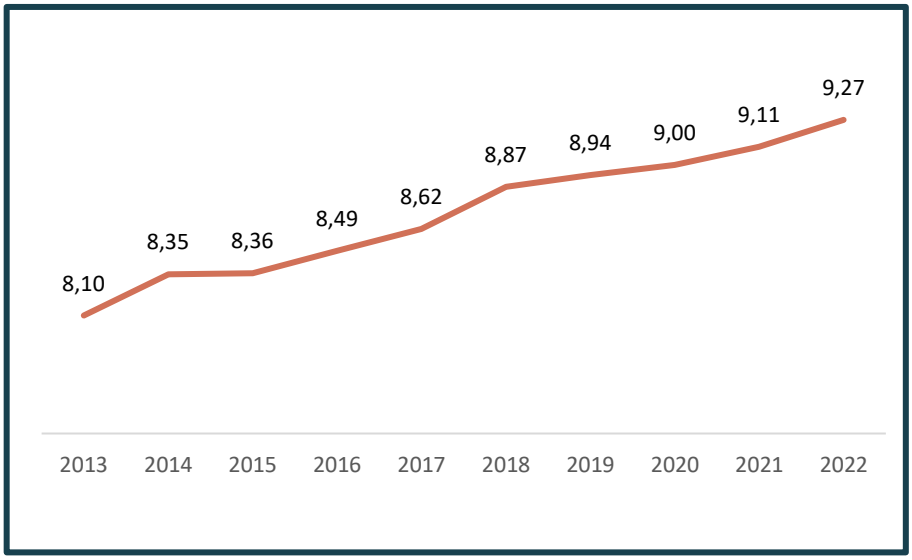
Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama periode 2013 hingga 2022, harapan lama sekolah di Provinsi Kalimantan Utara meningkat 0,76 tahun, atau secara rata-rata tumbuh 0,67 persen per tahun. Meningkatnya harapan lama sekolah merupakan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang dapat menikmati bangku sekolah. Pada tahun 2022, harapan lama sekolah di Provinsi Kalimantan Utara telah mencapai 13,06 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma I.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Utara rata-rata tumbuh 1,51 persen per tahun selama periode 2013 hingga 2022. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Provinsi Kalimantan Utara yang lebih baik. Pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Kalimantan Utara usia 25 tahun ke atas mencapai 9,27 tahun, atau dengan

kata lain rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga lulus SMP/sederajat.

Gambar 3.4 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Utara (tahun), 2013-2022



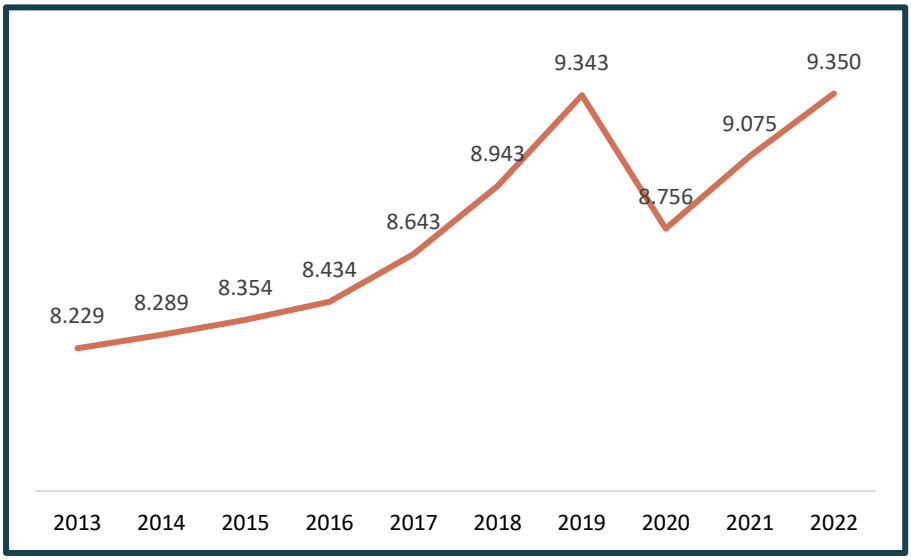
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dimesi ketiga dari komponen IPM adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh indikator pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Istilah 'yang disesuaikan' pada indikator ini merujuk pada besaran nilai pengeluaran per kapita penduduk yang telah distandarisasi dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*/PPP) untuk menjaga keterbandingan antar wilayah sehingga satu rupiah memiliki daya beli yang sama di semua wilayah.

Setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, pengeluaran per kapita riil mulai terus tumbuh sejak 2021 hingga 2022. Kondisi ini didorong dengan semakin membaiknya perekonomian di Kalimantan Utara seiring penanganan pandemi COVID-19 yang baik dan

meningkatnya aktivitas ekonomi akibat berkurangnya berbagai pembatasan aktivitas masyarakat.

Gambar 3.5 Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan (ribu rupiah), 2013-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

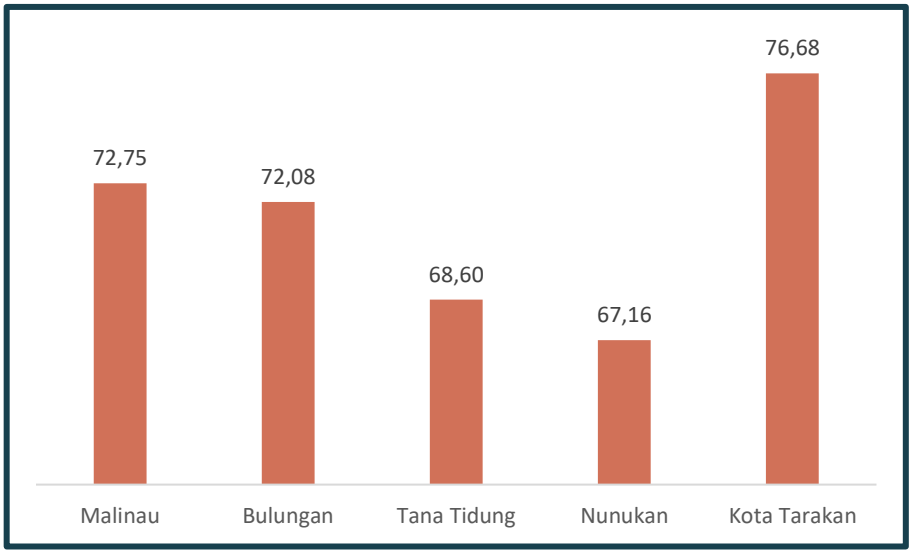
Pada tahun 2022, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara mencapai 9,35 juta rupiah per tahun, meningkat 3,03 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan pada saat sebelum pandemi COVID-19 tahun 2019.

3.2 Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Pada tahun 2022, pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan. IPM pada kabupaten/kota berada pada kisaran angka 67,16 hingga 76,68. IPM

tertinggi adalah Kota Tarakan, sementara yang paling rendah adalah Kabupaten Nunukan. Jika dilihat pada dimensi penyusunnya, baik indikator UHH, HLS, RLS, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan di Kota Tarakan merupakan yang paling tinggi di antara kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Sebaliknya, hampir pada seluruh dimensi penyusun IPM Kabupaten Nunukan adalah yang terrendah.

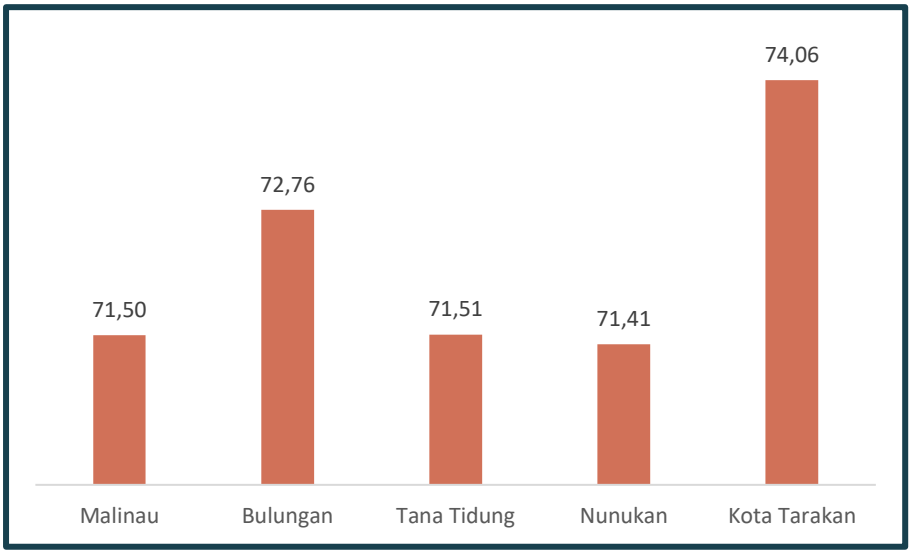
Gambar 3.6 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, umur harapan hidup (UHH) pada kabupaten/kota berada pada kisaran angka 71,41 tahun hingga 74,06 tahun. UHH tertinggi di Kota Tarakan, sementara yang paling rendah di Kabupaten Nunukan. Jika dibandingkan dari kondisi geografis dan sarana prasarana Kesehatan yang tersedia, sarana dan prasarana Kesehatan di Tarakan memang lebih mumpuni dibandingkan di kabupaten/kota lainnya. Selain itu, kondisi geografis di Tarakan juga memudahkan akses masyarakat menuju fasilitas Kesehatan yang ada.

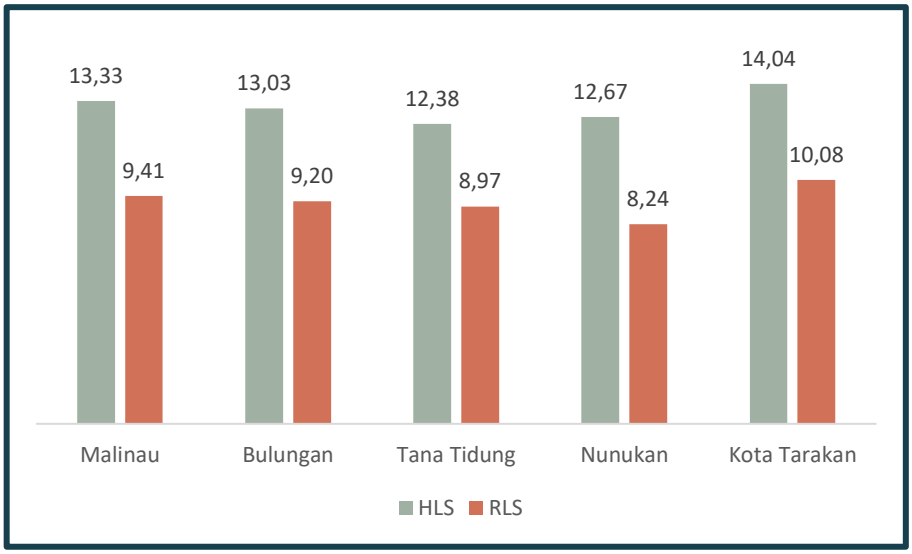
Gambar 3.7 UHH Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara (tahun), 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

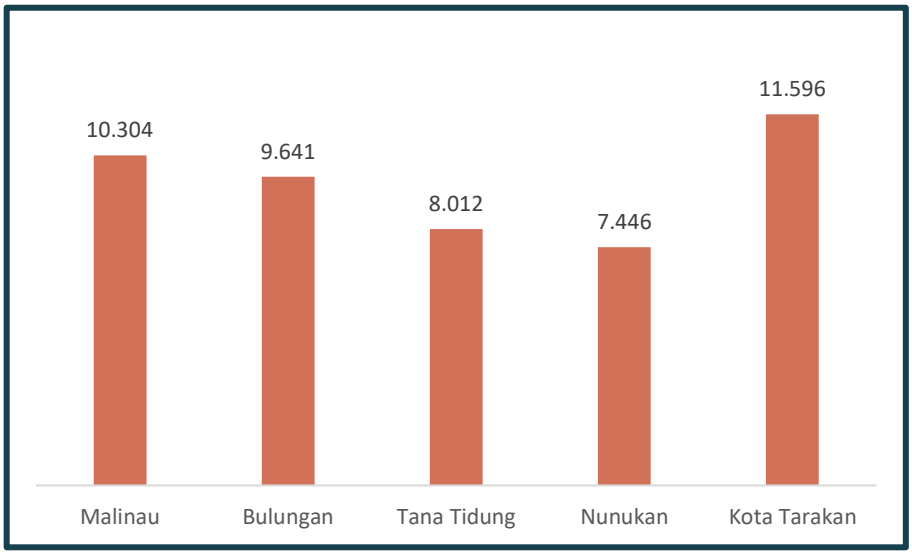
Dari dimensi pendidikan, HLS pada kabupaten/kota berada pada kisaran angka 12,38 tahun hingga 14,04 tahun. Kabupaten/kota dengan HLS tertinggi adalah Kota Tarakan, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Tana Tidung. Sementara itu, untuk indikator RLS, berada pada kisaran 8,24 tahun hingga 9,98 tahun. Kabupaten/kota dengan HLS tertinggi adalah Kota Tarakan, sementara yang paling rendah adalah Kabupaten Nunukan. Sama seperti pada dimensi kesehatan, sarana prasarana serta akses pendidikan di Kota Tarakan lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Satu-satunya universitas negeri juga terletak di Kota Tarakan.

Gambar 3.8 HLS dan RLS Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara (tahun), 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

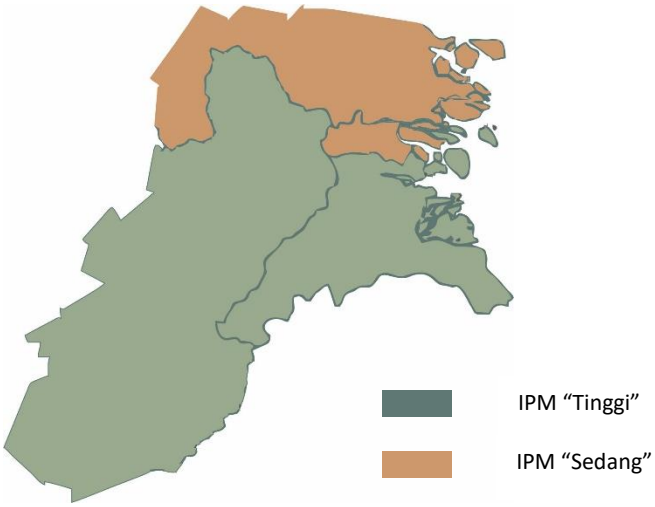
Gambar 3.9 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara (ribu rupiah), 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari dimensi standar hidup layak, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan pada kabupaten/kota berada pada kisaran angka 7,446 juta rupiah per tahun tahun hingga 11,596 juta rupiah per tahun. Pengeluaran riil per kapita disesuaikan masyarakat Tarakan adalah yang tertinggi, sedangkan yang terrendah adalah Nunukan.

Gambar 3.10 Status IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika dilihat berdasarkan statusnya, capaian pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Utara masih sama seperti tahun sebelumnya. Terdapat tiga kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia "tinggi" yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan. Sementara itu, dua kabupaten lainnya, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan masih berstatus "sedang". Oleh karena itu, perlu upaya khusus untuk menciptakan percepatan peningkatan

IPM pada kedua kabupaten tersebut agar kesenjangan pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Utara dapat dikurangi dan status pembangunan manusia dapat ditingkatkan dari level “sedang” menjadi “tinggi”.

BAB IV

PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN TANA TIDUNG

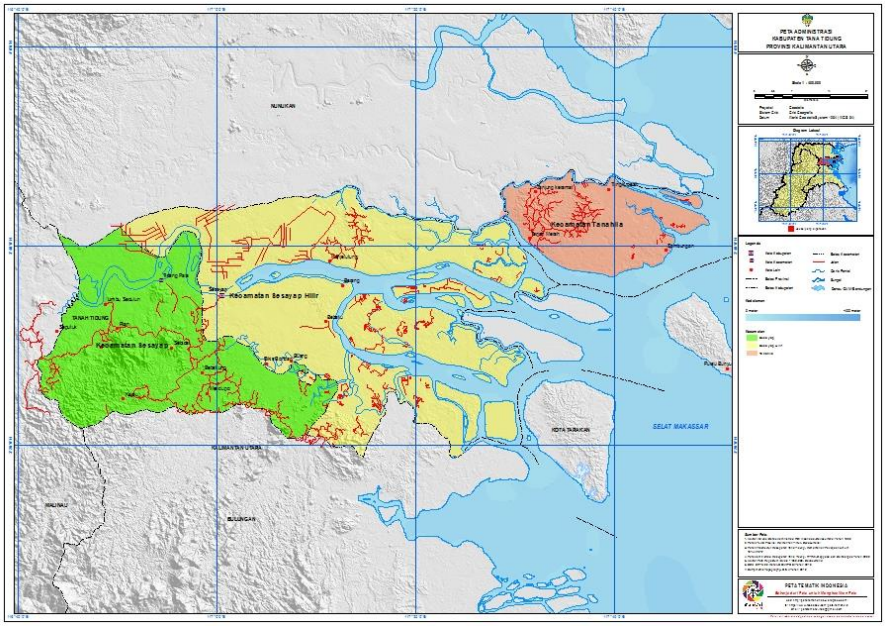


4.1 Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung

4.1.1 Kondisi Geografis

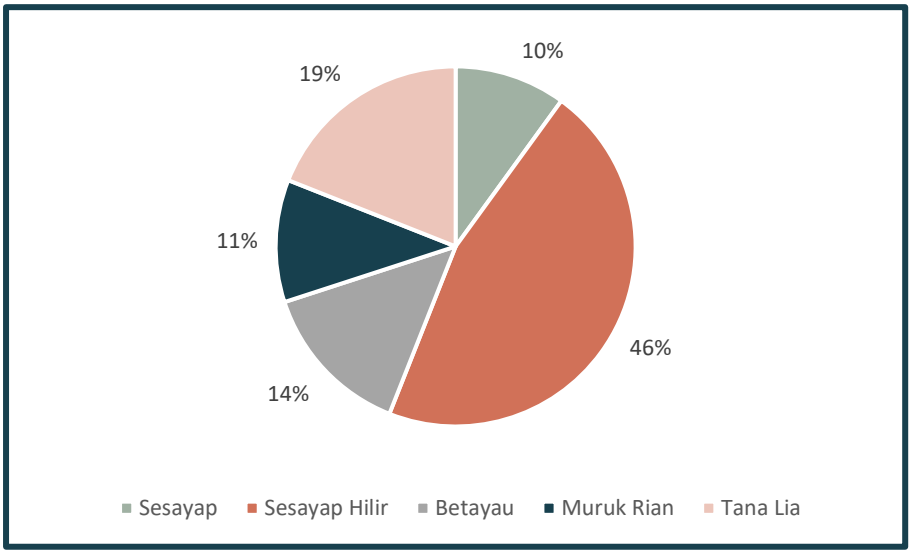
Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten termuda di provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Tana Tidung mulai terbentuk pada tahun 2007. Secara astronomis, Kabupaten Tana Tidung terletak pada 94°45’ Bujur Barat - 141°05’ Bujur Timur dan 6°08’ Lintang Utara - 11°15’ Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Tana Tidung berbatasan langsung dengan Kabupaten Nunukan di sebelah utara, Kabupaten Malinau di sebalah barat, dan Kabupaten Bulungan di sebelah selatan. Sementara itu, bagian timur Kabupaten Tana Tidung berbatasan dengan Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Tana Tidung



Sumber: tanatidungkab.go.id

Gambar 4.2 Persentase Luas Wilayah Kecamatan terhadap Luas Kabupaten Tana Tidung



Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung

Luas wilayah Kabupaten Tana Tidung sekitar 5,4 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara (75.467,70 km²), yaitu sebesar 4.058,70 km² yang terbagi dalam lima kecamatan dan 32 desa. Kecamatan Sesayap Hilir merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 46 persen dari seluruh luas Kabupaten Tana Tidung dan memiliki 23 pulau yang tersebar di wilayah kecamatan. Hal ini dikarenakan posisi wilayah kecamatan yang berbatasan dengan laut. Kecamatan Sesayap adalah kecamatan dengan luas wilayah terkecil, hanya sekitar 393,92 km^2 atau hanya 10 persen dari luas wilayah Kabupaten Tana Tidung. Meskipun demikian, Ibukota Kabupaten Tana Tidung berkedudukan di Kecamatan Sesayap. Kelima Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung berada pada ketinggian antara 19-100 meter di atas permukaan laut.

4.1.2 Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Tana Tidung termasuk daerah beriklim tropis. Data iklim untuk kabupaten ini berasal dari BMKG Kota Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, karena Kabupaten Tana TIdung belum memiliki stasiun klimatologi sendiri. Berdasarkan data dari BMKG Kabupaten Bulungan, suhu udara rata-rata di Kabupaten Tana Tidung selama tahun 2021 adalah 27,31^{o}C, dengan suhu tertinggi terjadi pada Bulan Desember, mencapai 36,40^{o}C dan suhu terendah terjadi pada Bulan Juni, mencapai 20,00^{o}C.

Tabel 4.1 Statistik Iklim Kabupaten Tana Tidung

Uraian	Satuan	2021
(1)	(2)	(3)
Suhu Udara		
Rata-rata	^{o}C	27,31
Minimum	^{o}C	20
Maksimum	^{o}C	36,22
Kecepatan Angin (rata-rata)	Knot	4,92
Kelembaban Udara (rata-rata)	%	85
Tekanan Udara(rata-rata)	Mb	1 009,29
Curah Hujan (jumlah)	Mm^{3}	223,58

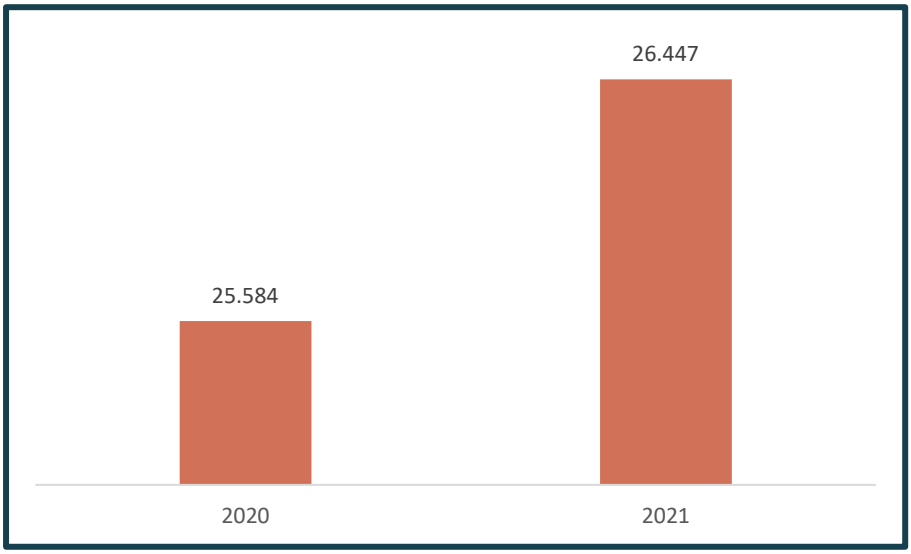
Sumber: Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan Bulungan

Rata-rata kecepatan angin selama tahun 2021 adalah 4,92 knot. Rata-rata kelembaban udara berada pada kisaran 83 hingga 88 persen. Rata-rata kelembaban udara tertinggi terjadi pada Bulan Juli, sedangkan yang terendah terjadi pada Bulan September. Sementara itu, rata-rata tekanan udara selama 2021 adalah 1009,29 mb dan Jumlah curah hujan 223,58 mm^{3}.

4.1.3 Kependudukan

Jumlah penduduk Tana Tidung berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 sebanyak 25.584 jiwa. Dibandingkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk di Kabupaten Tana Tidung telah meningkat 68,29 persen.

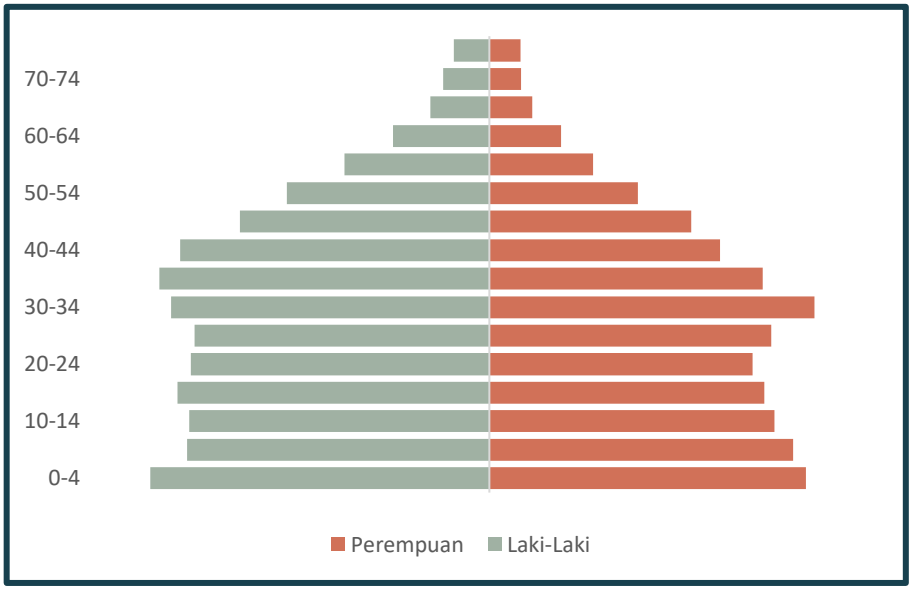
Gambar 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung, 2020-2021



Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023, jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung pada 2021 juga mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung tahun 2021 tercatat sebanyak 26.447 jiwa, meningkat 3,37 persen dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan penduduk ini cenderung melambat jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun selama 2010-2020.

Gambar 4.4 Piramida Penduduk Kabupaten Tana Tidung, 2021



Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung

Apabila dilihat dari struktur penduduknya, penduduk Tana Tidung tergolong berstruktur *expansive* yang dapat dilihat dari piramida penduduk dimana jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tua. Selain itu, piramida penduduk juga dapat menjelaskan sejarah kelahiran dan kematian penduduk. Penduduk Kabupaten Tana Tidung berkonsentrasi pada kelompok muda. 27,07 persen penduduk berusia 0-14 tahun, 69,33 persen penduduk berusia 15-64 tahun, dan 3,61 persen merupakan penduduk usia 65 tahun keatas. Saat ini, Kabupaten Tana Tidung sedang mengalami bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibanding penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Lebih dari 60 persen penduduk Tana Tidung berusia produktif. Periode ini lambat laun akan menghilang. Penduduk produktif akan menua seiring dengan waktu. Oleh karena itu, momen bonus

demografi dengan besarnya jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi harus dioptimalkan.

Dibedakan menurut jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari angka *sex ratio* sebesar 114, artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 114 penduduk laki-laki.

Tabel 4.2. Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
(1)	(2)	(3)	(4)
Muruk Rian	1.532	2,47	3,49
Sesayap	10.832	2,44	27,5
Betayau	2.934	2,63	5,07
Sesayap Hilir	7.724	2,84	4,11
Tana Lia	3.425	1,92	4,46

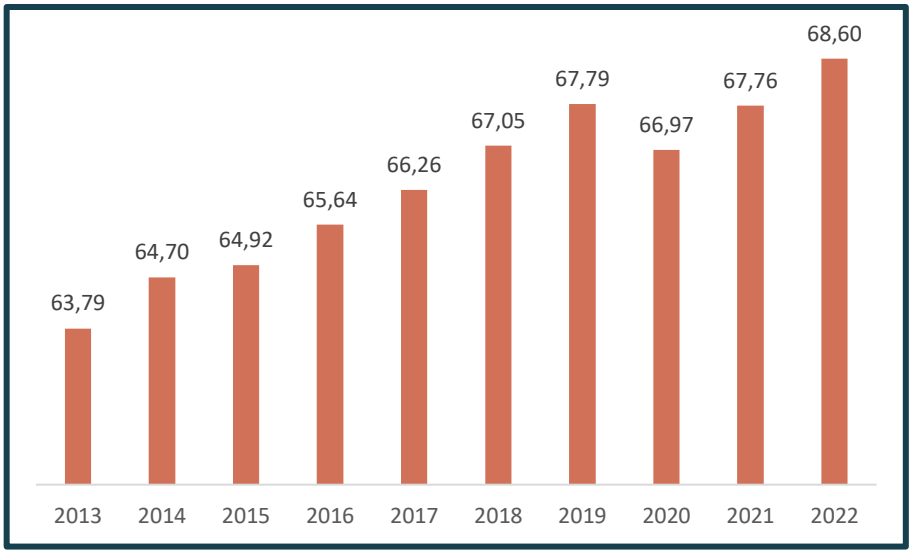
Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung

Jika dirinci per kecamatan, kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah kecamatan Sesayap, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Muruk Rian. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Tana Tidung di setiap kecamatan berada pada kisaran 1-2 persen. Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk berkisar antara 3 hingga 27 persen. Kecamatan Sesayap memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 27,5 jiwa/km2.

4.2 Perkembangan Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Tidung

Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Tana Tidung terus mengalami kemajuan. Walaupun sempat mengalami penurunan pada 2020 akibat terdampak pandemi COVID-19, IPM Kabupaten Tana Tidung kembali menunjukkan peningkatan mulai tahun 2021. Hal ini seiring dengan pemulihan kinerja perekonomian dan penanganan pandemi COVID-19 yang berjalan baik.

Gambar 4.5 IPM Kabupaten Tana Tidung, 2013-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada kondisi normal (2013-2019), pembangunan manusia di Kabupaten Tana Tidung secara rata-rata tumbuh 1,02 persen per tahun, dari 63,79 pada 2013 menjadi 67,79 pada 2019. Ketika virus COVID-19 mulai masuk, IPM Kabupaten Tana Tidung turun hingga 0,82 persen menjadi 66,97. Selanjutnya, di masa pemulihan ekonomi tahun 2021, IPM Kabupaten Tana Tidung terus tumbuh hingga kini pada tahun 2022 mencapai 68,60. IPM

Kabupaten Tana Tidung tumbuh 1,2 persen pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan IPM pada kondisi normal sebelum pandemi COVID-19. Kecepatan pertumbuhan IPM di Kabupaten Tana Tidung juga lebih tinggi daripada kecepatan pertumbuhan Provinsi Kalimantan Utara.

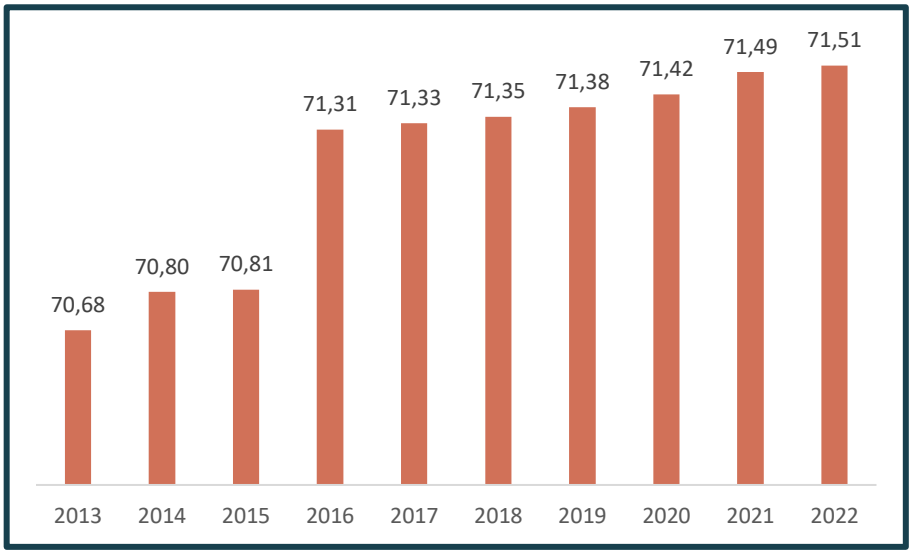
Upaya peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Tana Tidung, perlu didukung dengan peningkatan pada seluruh komponen penyusunnya, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan.

4.2.1 Pembangunan Manusia dari Dimensi Kesehatan

Kesehatan menjadi salah satu poin penting dalam pembangunan manusia. Kualitas hidup manusia sangat tergantung dari derajat kesehatannya. Derajat kesehatan dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka mortalitas menunjukkan jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun. Umur Harapan Hidup (UHH) dapat mengindikasikan tingkat kematian yang dilihat dari sisi harapan hidupnya.

UHH Kabupaten Tana Tidung terus menunjukkan peningkatan selama tahun 2013-2022. Rata-rata pertumbuhan UHH pada periode tersebut sebesar 0,13 persen per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Tana Tidung semakin membaik. Bayi yang baru lahir memiliki harapan untuk hidup lebih lama.

Gambar 4.6 Umur Harapan Hidup Kabupaten Tana Tidung (tahun), 2013-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

UHH Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2022 mencapai 71,51 tahun. Dengan demikian, penduduk Kabupaten Tana Tidung yang lahir pada tahun 2022 memiliki peluang hidup hingga usia 71 tahun 6 bulan.

Angka kesakitan (morbiditas) adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Semakin tinggi angka morbiditas, semakin rendah tingkat derajat kesehatan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 menunjukkan bahwa angka morbiditas di Kabupaten Tana Tidung sebesar 6,82 persen, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan membaiknya kondisi kesehatan masyarakat. Indikator-indikator kesehatan lain di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Beberapa Indikator Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, 2020-2021

Indikator	Satuan	2020	2021	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	Persen	83,77	90,73	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	Persen	96,22	97,19	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	Persen	59,73	70,3	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	Persen	81,23	85,88	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	Persen	1,57	2,2	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Persen	85,12	83,73	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap	Persen	54,8	64,68	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Indikator	Satuan	2020	2021	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 tahun terahir dengan Berat Badan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Kurang Dari 2,5 kg	Persen	12,23	9,5	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Jumlah Kelahiran Hidup		498	498	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
Jumlah Kematian Ibu		1	2	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
Jumlah Kematian Bayi		2	8	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
Prevalensi Stunting	Persen	16,21	23,12	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

Tingkat kesehatan masayarakat pada suatu wilayah juga sangat berkaitan dengan sarana prasaranan kesehatan serta aksesbilitas terhadap fasilitas kesehatan yang tersedia. Saat ini, di Kabupaten Tana Tidung hanya tersedia satu rumah sakit, yang berada di Kecamatan Sesayap. Oleh karena itu, masyarakat Tana Tidung yang memerlukan pelayanan rumah sakit, harus menuju Kecamatan Sesayap. Jarak dan akses menuju Kecamatan Sesayap cukup terjangkau bagi masyarakat yang tinggal di Kecamatan Sesayap Hilir, Betayau, dan Muruk Rian. Namun, bagi masyarakat yang

tinggal di Kecamatan Tana Lia, biasanya lebih memilih ke Kota Tarakan karena akses menuju Kota Tarakan lebih mudah.

Kabupaten Tana Tidung cukup diuntungkan secara geografis karena terletak di tengah antara kabupaten Bulungan, Malinau, dan Tarakan, sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk mendapat pelayanan kesehatan, selain di rumah sakit yang tersedia di Kabupaten Tana Tidung, dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia di kabupaten/kota lain yang relatif masih mudah untuk dijangkau.

Berbeda dengan rumah sakit, untuk puskesmas, sudah tersedia di seluruh kecamatan di Kabupaten Tana Tidung. Tersedia satu puskesmas di setiap kecamatan. Di samping itu, tersedia juga beberapa unit puskesmas pembantu (pustu) di sejumlah desa. Total pustu yang tersedia di Kabupaten Tana Tidung adalah 17 unit.

Tabel 4.4 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tana Tidung, 2020-2021

Kecamatan	Tenaga Kesehatan				
	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Muruk Rian	1	10	7	0	0
Sesayap	3	15	11	1	3
Betayau	0	18	6	1	1
Sesayap Hilir	2	18	16	1	0
Tana Lia	1	26	12	1	2
Kabupaten Tana Tidung	7	87	52	4	6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung

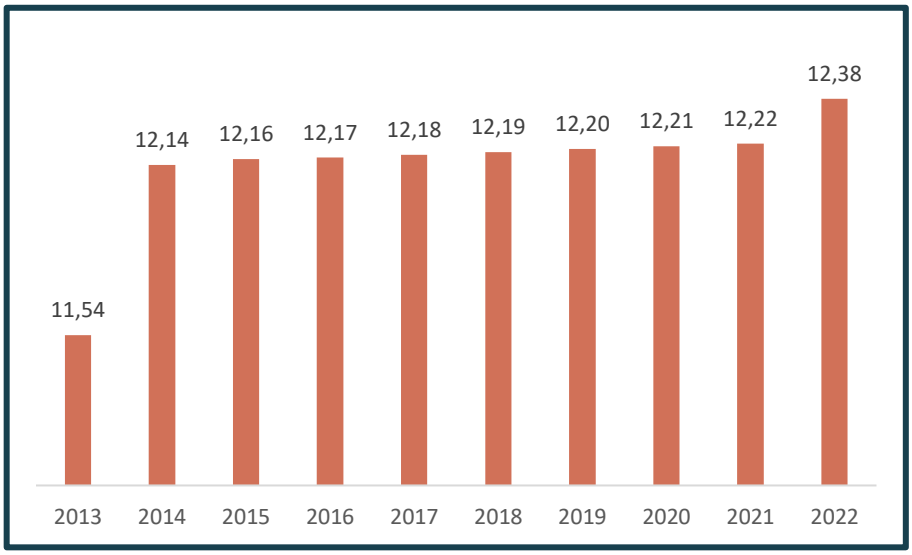
Dari sisi tenaga Kesehatan, jumlah tenaga kesehatan yang tersedia pada tahun 2021 masih terbatas, utamanya dokter. Kecamatan dengan

jumlah dokter terbanyak adalah Kecamatan Sesayap, satu-satunya kecamatan yang mempunyai rumah sakit. Jumlah dokter di rumah sakit di Kecamatan Sesayap hanya tiga orang saja. Hal ini merupakan salah satu faktor belum terakreditasinya rumah sakit di Kabupaten Tana Tidung. Setidaknya, di setiap rumah sakit, tersedia tiga dokter spesialis dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Sementara itu, untuk jumlah perawat dan bidan dapat dikatakan mencukupi, karena telah tersedia 87 perawat dan 52 bidan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tana Tidung.

4.2.2 Pembangunan Manusia dari Dimensi Pendidikan

Upaya pembangunan manusia turut didorong melalui peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan akan memacu kemajuan pada bidang-bidang lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

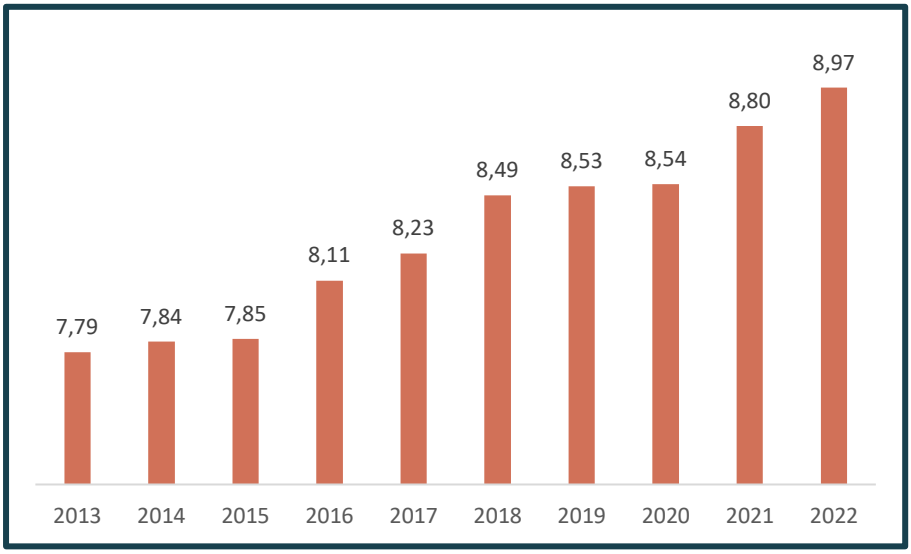
Gambar 4.7 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tana Tidung (tahun), 2013-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama periode 2013 hingga 2022, harapan lama sekolah di Kabupaten Tana Tidung meningkat 0,84 tahun, atau secara rata-rata tumbuh 0,80 persen per tahun. Meningkatnya harapan lama sekolah merupakan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang dapat menikmati bangku sekolah. Pada tahun 2022, harapan lama sekolah di Kabupaten Tana Tidung telah mencapai 12,38 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA/sederajat.

Gambar 4.8 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Tidung (tahun), 2013-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tana Tidung rata-rata tumbuh 1,59 persen per tahun selama periode 2013 hingga 2022. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Tana Tidung yang lebih baik. Pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk

Kabupaten Tana Tidung usia 25 tahun ke atas mencapai 8,97 tahun, atau dengan kata lain rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menjalani pendidikan hingga kelas 2 pada jenjang SMP/Sederajat.

Tabel 4.5 Beberapa Indikator Pendidikan Kabupaten Tana Tidung, 2020-2021

Indikator Pendidikan	Tahun	
	2020	2021
Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
7-12 tahun	99,21	99,03
13-15 tahun	98,58	98,64
16 - 18 tahun	55,98	56,82
Angka Partisipasi Murni (APM)		
SD/Sederajat	86,66	87,01
SMP/Sederajat	77,93	77,49
SMA/Sederajat	44,87	47,27
Angka Partisipasi Kasar (APK)		
SD/Sederajat	98,76	100,29
SMP/Sederajat	114,05	112,87
SMA/Sederajat	68,29	70,76
Persentase Penduduk Menurut Ijazah Tertinggi		
Tidak Punya Ijazah	26,88	13,91
SD/Sederajat	18,31	24,01
SMP/Sederajat	18,23	21,19
SMA/Sederajat	27,87	28,56
Diploma/Sarjana ke atas	8,70	12,34

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Beberapa indikator lainnya untuk menggambarkan kondisi pendidikan antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS merupakan indikator yang mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Semakin tinggi nilai APS menunjukkan semakin banyak penduduk yang dapat menikmati sarana

pendidikan. Pada tahun 2021, APS untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,03 persen, artinya dari setiap 100 anak usia 7-12 tahun, terdapat sekitar satu anak yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi (*drop out*). APS untuk kelompok umur 13-15 tahun sebesar 98,64 dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 56,82 persen. Dari ketiga kelompok umur tersebut, terdapat kesenjangan antara APS kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun dengan 16-18 tahun. APS kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun sudah mendekati 100 persen, namun APS kelompok umur 16-18 tahun masih cukup jauh menuju 100 persen.

APM mengindikasikan proporsi anak usia sekolah yang dapat sekolah tepat waktu. Pada tahun 2021, APM tertinggi pada tingkat SD/sederajat sebesar 87,01. APM pada tingkat SMP/sederajat sebesar 77,49 persen dan APM pada tingkat SMA/ sederajat sebesar 47,27 persen.

APK menggambarkan partisipasi penduduk yang sedang menempuh pendidikan tanpa mempertimbangkan usia. Pada tahun 2021, APK untuk tingkat SD/sederajat sebesar 100,29 tingkat SMP/sederajat sebesar 112,87, dan tingkat SMA/sederajat sebesar 70,76. Angka APK yang lebih tinggi daripada APM menunjukkan adanya penduduk yang tidak sekolah tepat waktu.

Jika dicermati kembali, baik APS, APM maupun APK, menunjukkan adanya kecenderungan penurunan setiap jenjang sekolah yang lebih tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait akses pendidikan menengah dan tinggi yang capaiannya belum setinggi pendidikan dasar.

Dari sisi sarana prasarana pendidikan, pada tahun ajaran 2021/2022, terdapat 54 sekolah di Kabupaten Tana Tidung, yang terdiri dari 9 TK, 30 SD/MI, 11 SMP/MTs, 3 SMA, dan 1 SMK. Pada jenjang sekolah dasar

dan sekolah menengah pertama, sekolah yang tersedia menyebar di seluruh kecamatan. Namun, untuk jenjang sekolah menengah atas, sekolah hanya tersedia di Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, dan Tana Lia, sementara di Kecamatan Muruk Rian dan dan Betayau belum terdapat sekolah menengah atas/sederajat. Ketersediaan sekolah serta jumlah murid dan guru selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, Tahun Ajaran 2021/2022

Kecamatan	Muruk Rian	Sesayap	Betayau	Sesayap Hilir	Tana Lia	Kabupaten Tana Tidung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Sekolah						
SD/MI	4	8	5	10	3	30
SMP/MTS	2	3	1	3	2	11
SMA/SMK	0	1	0	2	1	4
Jumlah Guru						
SD/MI	39	118	54	113	38	362
SMP/MTS	50	41	22	50	30	193
SMA/SMK	0	35	0	37	19	91
Jumlah Murid						
SD/MI	191	1462	450	927	372	3402
SMP/MTS	441	242	114	267	164	1228
SMA/SMK	0	499	0	334	184	1017
Rasio Murid-Guru						
SD/MI	5	12	8	8	10	9
SMP/MTS	9	6	5	5	5	6
SMA/SMK	-	14	-	9	10	11

Sumber: Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Data Pokok Pendidikan dan Kementerian Agama

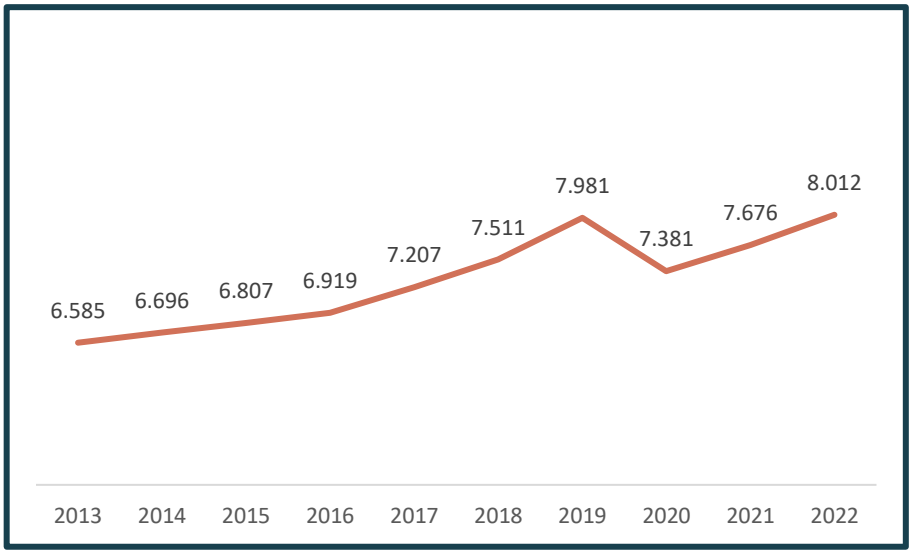
Secara umum, jika melihat jumlah guru dan murid di Kabupaten Tana Tidung, guru yang tersedia telah mencukupi secara kuantitas. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan, pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Sementara itu, di Kabupaten Tana Tidung, rata-rata 1 guru menangani 9 murid pada jenjang SD/MI, 6 murid pada jenjang SMP/MTS, dan 11 murid pada jenjang SMA/SMK. Walaupun demikian, untuk mendukung pembelajaran, perlu dipastikan kembali apakah kapasitas guru yang tersedia sudah memenuhi atau sesuai kebutuhan.

4.2.3 Pembangunan Manusia dari Dimensi Standar Hidup Layak

Dimesi ketiga dari komponen IPM adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh indikator pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, pengeluaran per kapita riil yang disesuikan mulai terus tumbuh sejak 2021 hingga 2022 seiring membaiknya perekonomian di Kabupaten Tana Tidung.

Pada tahun 2022, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan penduduk Kabupaten Tana Tidung mencapai 8,012 juta rupiah per tahun, meningkat 4,38 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan pada saat sebelum pandemi COVID-19 tahun 2019.

Gambar 4.9 Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Tana Tidung (ribu rupiah), 2013-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pengeluaran per kapita masyarakat berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini juga berkaitan dengan kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Selama lima tahun terakhir, kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung cenderung membaik. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Tidung sebesar 6,63 persen menurun hingga 5,15 persen pada 2021. Walaupun terlihat adanya sedikit kenaikan pada 2020 dan 2021, akibat dampak pandemi COVID-19, tingkat kemiskinan masih berada pada kisaran 4-5 persen, lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara yang berada pada kisaran 6-7 persen.

Gambar 4.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (persen) di Kabupaten Tana Tidung, 2017-2021



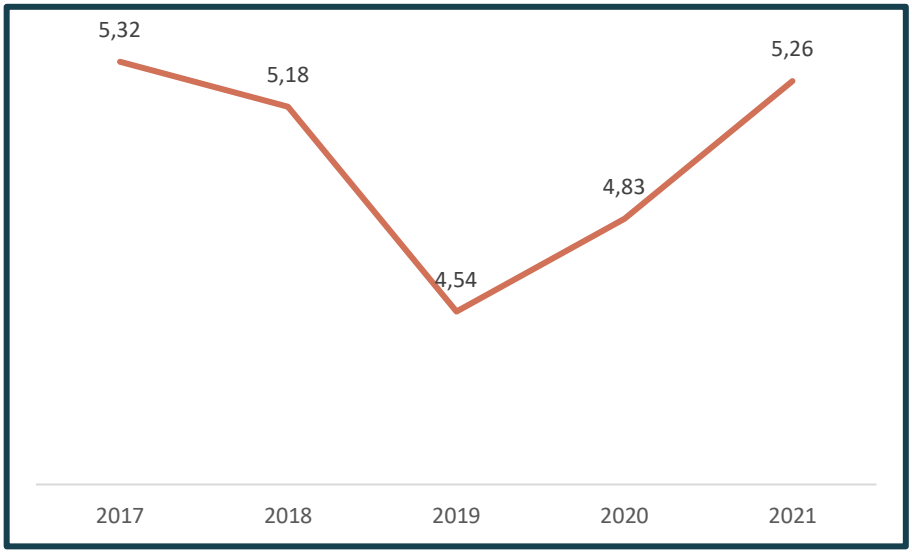
Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret

Melihat distribusi pengeluaran per kapita penduduk, indikator koefisien gini di Kabupaten Tana Tidung kembali sedikit meningkat pada 2021. Koefisien gini merupakan ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita di suatu daerah. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana Ketika koefisien gini bernilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna, sebaliknya Ketika koefisien gini bernilai 1 menunjukkan terjadinya ketimpangan sempurna. Koefisien gini Kabupaten Tana Tidung pada 2021 sebesar 0,312.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka yang sedikit demi sedikit dapat ditekan hingga 2019, kembali menunjukkan kenaikan pada 2020 dan 2021 akibat terdampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan sejumlah tenaga kerja mengalami PHK, diberhentikan sementara, atau pengurangan kerja. Tingkat pengangguran

terbuka kabupaten Tana Tidung pada 2021 mencapai 5,26 persen, lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 4.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Kabupaten Tana Tidung, 2017-2021



Sumber: BPS, Survei Ketenagakerjaan Nasional (SAKERNAS) Agustus

Jika melihat kinerja perekonomian Kabupaten Tana Tidung, pada 2020, ekonomi Kabupaten Tana Tidung sempat terkontraksi 0,92 persen. Selanjutnya, ekonomi mulai tumbuh hingga 4,29 persen pada 2021. Namun, ekonomi pada 2021 belum sepenuhnya pulih karena pandemi COVID-19 masih ada.

Aktivitas ekonomi Kabupaten Tana Tidung diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk menekan pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, daya beli masyarakat pun akan ikut terdorong untuk semakin meningkat.

3.3 *Issue-Issue* Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil *indepth study* dengan sejumlah OPD Kabupaten Tana Tidung, beberapa *issue-issue* terkait dimensi pembangunan manusia di Kabupaten Tana Tidung diantaranya:

1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat
    a. Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Tana Tidung masih terbatas. Saat ini, jumlah rumah sakit yang tersedia hanya satu. Akreditasi rumah sakit yang tersedia pun masih "D". Akibatnya, masyarakat harus mencari alternatif rumah sakit di kabupaten/kota lain apabila memerlukan pelayanan rumah sakit.
    b. Jumlah tenaga kesehatan juga masih terbatas dan belum merata. Kurangnya tenaga kesehatan disebabkan kurangnya minat tenaga kesehatan untuk bekerja di Kabupaten Tana Tidung karena faktor geografis serta keterbatasan sarana dan prasarana di kabupaten ini jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya.
    c. Pemanfaatan dana desa untuk mendukung layanan kesehatan kurang optimal.
2. Dimensi Pengetahuan
    a. Secara kuantitas, jumlah tenaga pendidik atau guru yang tersedia di Kabupaten Tana Tidung sudah mencukupi. Secara kumulatif, rasio murid-guru masih di bawah rasio murid-guru yang tertera dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Namun, persebaran guru belum merata. Beberapa guru juga masih

belum sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi dalam mengajar.

b. Peningkatan kualitas pendidikan terlalu terfokus pada sekolah terpadu di Tideng Pale sehingga sekolah-sekolah lainnya kurang mendapat perhatian. Kebijakan sekolah terpadu ditujukan untuk mencetak SDM unggul di Kabupaten Tana Tidung. Sayangnya, tidak semua masyarakat dapat mengakses pendididikan melalui sekolah tersebut karena berbagai alasan, salah satunya faktor geografis. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan di lokasi lain juga perlu mendapat perhatian.

c. Tidak tersedia perguruan tinggi di Kabupaten Tana Tidung. Akibatnya, penduduk lulusan SMA harus meninggalkan wilayah Kabupaten Tana Tidung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

d. Adanya pola pikir sebagian masyarakat yang masih menyepelekan pentingnya pendidikan. Adanya progam sekolah gratis menjadi tidak termanfaatkan secara optimal.

e. Fasilitas pendukung pendidikan, seperti akses internet masih belum merata. Pada sebagian wilayah, sinyal internet sebagai pendukung pembelajaran sulit diakses.

3. Dimensi Standar Hidup Layak

a. Harga-harga di Kabupaten Tana Tidung relatif tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain. Tingginya harga di Kabupaten Tana Tidung berdampak pada daya beli masyarakat. Semakin tinggi harga, semakin rendah daya beli masyarakat. Salah satu penyebab tingginya harga-

harga di Kabupaten Tana Tidung adalah mahalnya biaya angkut.

b. Kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi cukup besar pada perekonomian Kabupaten Tana Tidung adalah Pertambangan dan Penggalian (batubara) serta Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (kelapa sawit). Adanya perusahaan batubara dan kelapa sawit yang sempat tutup membawa dampak pada lesunya perekonomian di Kabupaten Tana Tidung.

c. Aktivitas ekonomi di Kabupaten Tana Tidung memiliki ketergantungan dengan pengeluaran pemerintah, baik belanja pemerintah berupa barang jasa ataupun gaji pegawai. Apabila terdapat keterlambatan atau kurangnya realisasi pengeluaran pemerintah, aktivitas ekonomi pada masyarakat juga terhambat.

Sebagai tindak lanjut dari *issue-issue* di atas, perlu penyusunan program yang tepat untuk dapat mewujudkan percepatan pembangunan manusia di Kabupaten Tana Tidung.

4.4 Simulasi dalam Penyusunan Target Perencanaan Pembangunan Manusia

Dengan capaian IPM tahun 2022, status pembangunan manusia di Kabupaten Tana Tidung masih tetap berada di level “sedang”. Walaupun demikian, melihat kecepatan IPM selama dua tahun terakhir, memberikan sinyal positif pembangunan manusia untuk tahun-tahun selanjutnya.

Gambar 4.12 Pertumbuhan IPM Kabupaten Tana Tidung (persen), 2014-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama tahun 2014-2022, IPM Kabupaten selalu tumbuh positif, kecuali pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Pertumbuhan IPM Kabupaten Tana Tidung sempat beberapa kali melambat pada 2015, 2017, dan 2019. Secara rata-rata, pada periode sebelum pandemi COVID-19 (2014-2019) IPM Kabupaten Tana Tidung tumbuh 1,02 persen per tahun. Selanjutnya, di masa pemulihan ekonomi, tahun 2021 dan 2022, IPM rata-rata tumbuh 1,21 persen per tahun.

Melihat pertumbuhan IPM Kabupaten Tana Tidung dari tahun ke tahun selama sepuluh tahun terakhir, jika pertumbuhannya tetap konsisten terjaga setidaknya seperti saat sebelum pandemi COVID-19, status pembangunan manusia di Kabupaten Tana Tidung diharapkan sudah berubah menjadi tinggi pada tahun 2024. Simulasi target IPM Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Estimasi Target IPM Kabupaten Tana Tidung, 2023-2026

IPM 2022	Pertumbuhan per tahun (persen)	Estimasi Target IPM			
		2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
68,60	0,5	68,94	69,29	69,63	69,98
	0,6	69,01	69,43	69,84	70,26
	0,7	69,08	69,56	70,05	70,54
	0,8	69,15	69,70	70,26	70,82
	0,9	69,22	69,84	70,47	71,10
	1,0	69,29	69,98	70,68	71,39
	1,02*	69,30	70,01	70,72	71,44
	1,1	69,35	70,12	70,89	71,67
	1,2	69,42	70,26	71,10	71,95
	1,3	69,49	70,40	71,31	72,24
	1,4	69,56	70,53	71,52	72,52
	1,5	69,63	70,67	71,73	72,81
Target RPJMD Kabupaten Tana Tidung		68,84	69,26	69,68	70,00

Catatan: *rata-rata pertumbuhan IPM sebelum masa pandemi COVID-19

: IPM dengan status tinggi

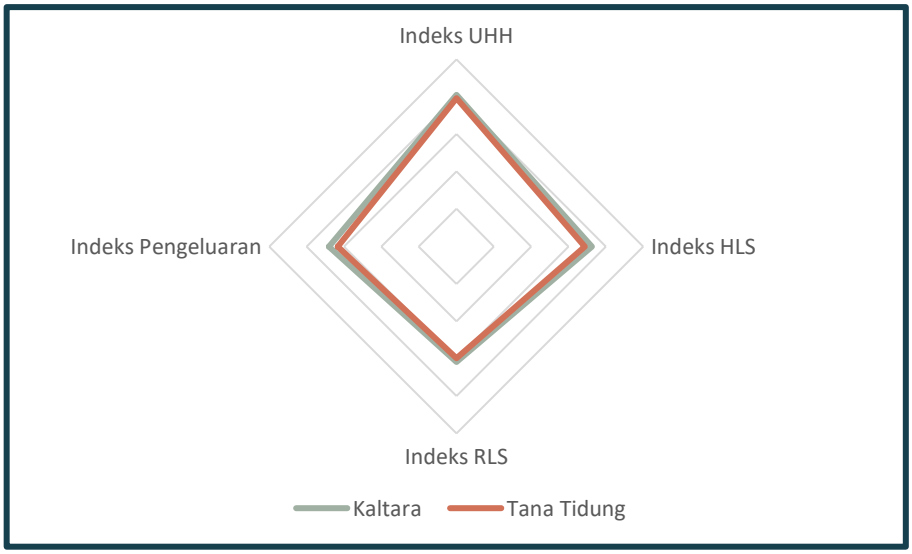
: IPM dengan status sedang

Dari tabel tersebut, tersedia estimasi target IPM dengan berbagai simulasi pertumbuhan per tahun. Semakin cepat pertumbuhan IPM, semakin cepat pula IPM Kabupaten Tana Tidung menuju status “Tinggi”. Saat ini, target yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung periode 2021-2026, IPM Kabupaten Tana Tidung ditargetkan menjadi tinggi pada 2026. Walaupun demikian, pemerintah dapat menaikkan status IPM menjadi tinggi pada 2024 jika mampu menjaga pertumbuhan IPM, setidaknya 1,02 persen per tahun, seperti rata-rata pertumbuhan IPMnya sebelum pandemi COVID-19. Jika IPM tumbuh lebih lambat (0,7-1,0 persen per tahun) IPM Kabupaten Tana Tidung akan naik menjadi “Tinggi” pada

2025. Namun, jika rata-rata pertumbuhan IPM kurang dari 0,06 persen per tahun, target untuk menaikkan level IPM Kabupaten Tana Tidung menjadi tinggi pada 2026 tidak akan tercapai.

Upaya peningkatan pembangunan manusia memerlukan sinergi dari ketiga dimensi penyusunnya, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Ketiganya harus seimbang untuk mencapai pembangunan manusia yang optimal. Hal ini karena penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan rata-rata geometrik dari ketiga indeks dimensi penyusunnya. Dengan penghitungan ini, kekurangan pada salah satu indeks, tidak dapat disubstitusi melalui indeks lain yang tinggi. Oleh karena itu, apabila hanya salah satu dimensi yang memiliki nilai tinggi, sementara dimensi lain rendah, maka IPM pun tidak akan optimal.

Gambar 4.13 Indeks Indikator Komponen IPM Kabupaten Tana Tidung, 2022



Sumber: BPS, diolah

Pada Gambar 4.13 menunjukkan indeks untuk setiap indikator penyusun IPM Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Tana Tidung. Indeks setiap indikator, baik UHH, HLS, RLS, maupun pengeluaran per kapita disesuaiakan di Kabupaten Tana Tidung selalu lebih rendah dibandingkan indeks Provinsi Kalimantan Utara.

Jika melihat nilai masing-masing indeks di Kabupaten Tana Tidung, terlihat masih adanya kesenjangan. Indeks UHH, sebesar 0,792 merupakan yang tertinggi dibandingkan indeks indikator lainnya. Dari dimensi pengetahuan, indeks HLS sebesar 0,688 dan indeks RLS sebesar 0,598. Indeks RLS merupakan yang terrendah. Sementara itu, indeks pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebesar 0,634.

Dari keempat indeks indikator penyusun IPM, fokus percepatan IPM dapat diutamakan melalui dimensi pengetahuan (RLS) dan standar hidup layak (Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan).

Berikut merupakan penghitungan target untuk dimensi standar hidup layak dengan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Target IPM menggunakan hasil simulasi dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,02 persen, sementara untuk indeks kesehatan dan pendidikan menggunakan target RPJMD yang ditetapkan Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 4.8 Estimasi Target IPM Kabupaten Tana Tidung beserta Komponennya, 2023-2026

Uraian	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Target IPM	69,30	70,01	70,72	71,44
Target Indeks Kesehatan	0,7953	0,7966	0,7979	0,7992
Target Indeks Pendidikan	0,6387	0,6428	0,647	0,6511
Target Indeks Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan	0,642	0,649	0,655	0,659
Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)	8.241	8.421	8.602	8.710

Sesuai dengan tabel 4.8, jika pemerintah ingin mencapai level pembangunan manusia “tinggi” di Kabupaten Tana Tidung pada 2024, dengan menggunakan target-target indikator yang telah ditetapkan, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan harus ditingkatkan hingga 8,42 juta rupiah per tahun pada 2024. Perlu peningkatan sebesar 5,10 persen dari pengeluaran per kapita disesuaikan pada 2022.

BAB V

PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN NUNUKAN

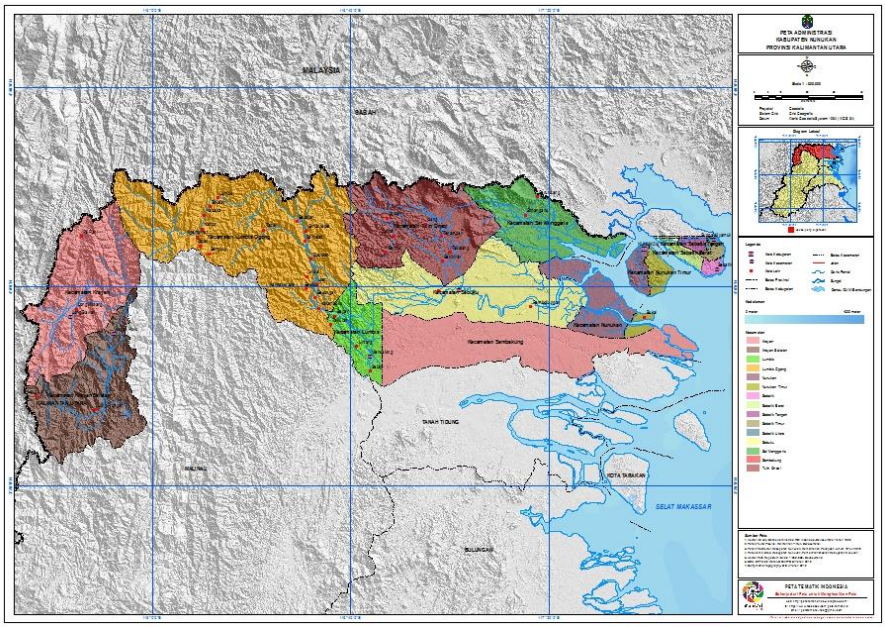


5.1 Gambaran Umum Kabupaten Nunukan

5.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Nunukan yang terletak antara 115°33’ sampai dengan 118°03’ Bujur Timur dan 3°15’00” sampai dengan 4°24’55” Lintang Utara merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Posisinya yang berada di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah beranda NKRI yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara.

Gambar 5.1 Peta Kabupaten Nunukan



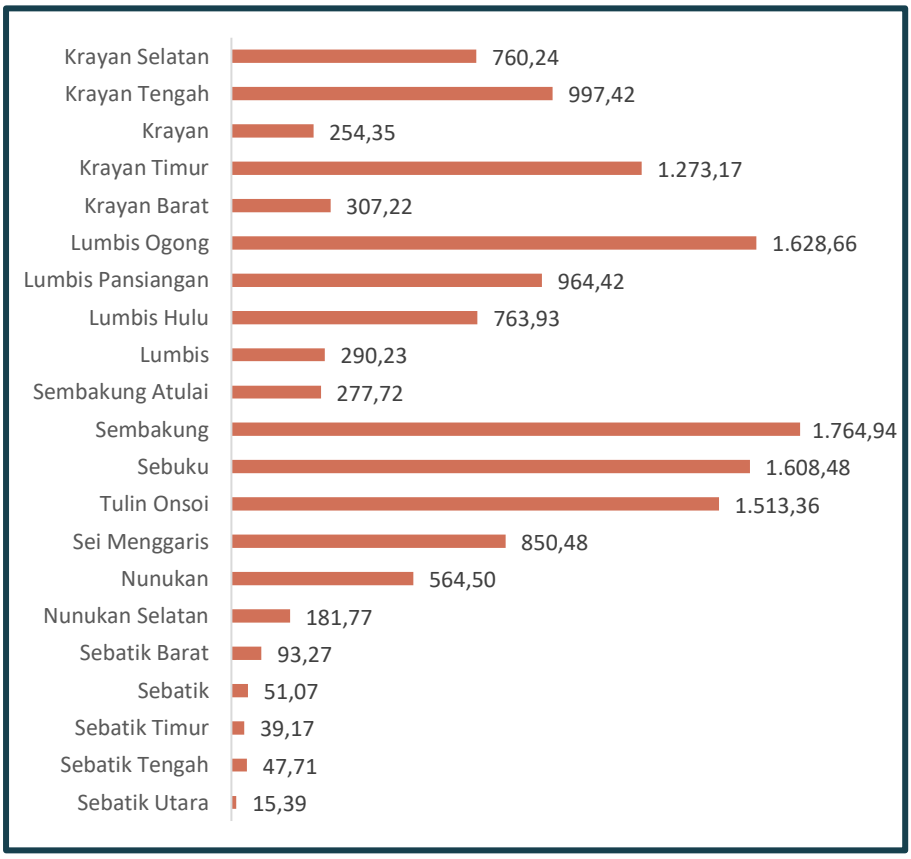
Sumber: kaltara.bpk.go.id

Kabupaten yang berdiri pada tahun 1999 ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan. Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Sabah, sebelah

Timur dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur Serawak.

Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan terjal terdapat di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian tengah dan dataran bergelombang landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur.

Gambar 5.2 Luas Wilayah Kabupaten Nunukan Menurut Kecamatan (km^2), 2021



Sumber: Bappeda Kabupaten Nunukan

Luas wilayah Kabupaten Nunukan sekitar 18,34 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara (75.467,70 km²), yaitu sebesar 13.841,90 km² yang terbagi dalam 21 kecamatan dan 232 desa. Kecamatan Sembakung merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 12,75 persen dari seluruh luas Kabupaten Nunukan. Sementara itu, Kecamatan Sebatik Utara adalah kecamatan dengan luas wilayah terkecil, hanya sekitar 15,39 km^2 atau hanya 0,11 persen dari luas wilayah Kabupaten Nunukan.

5.1.2 Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Nunukan berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu Muson Barat pada bulan November-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober.

Tabel 5.1 Statistik Iklim Kabupaten Nunukan

Uraian	Satuan	2021
(1)	(2)	(3)
Suhu Udara		
Rata-rata	°C	27,37
Minimum	°C	21,40
Maksimum	°C	34,20
Kelembaban Udara		
Rata-rata	%	84,40
Minimum	%	48,00
Maksimum	%	99,00
Curah Hujan (jumlah)	Mm^3	213

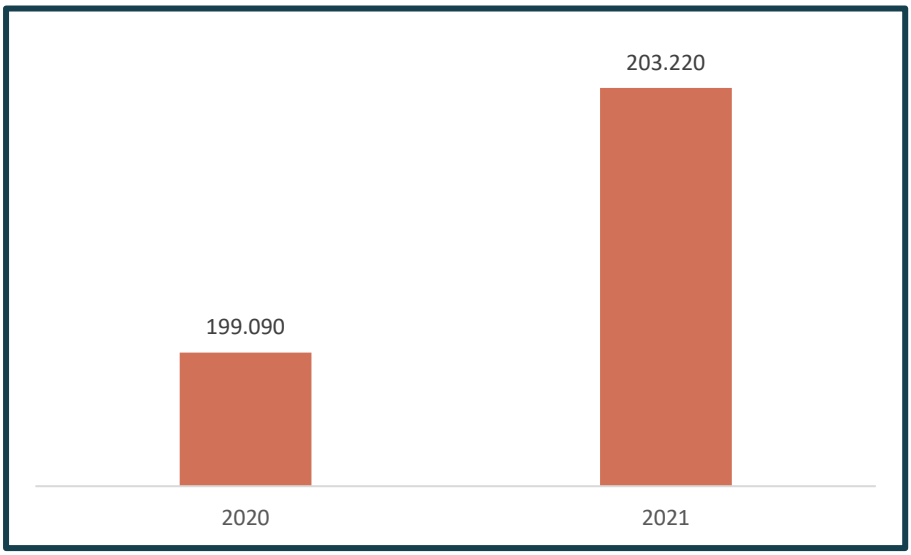
Sumber: Stasiun Meteorologi Nunukan

Pada tahun 2021, Kabupaten Nunukan diguyur hujan selama hampir 58,35 persen dalam setahun. Curah Hujan minimum terjadi pada Bulan Juni yaitu 102,3 mm3 dan curah hujan maksimum terjadi pada Bulan April yaitu sebesar 436,4 mm3. Sebagai daerah beriklim tropis dengan habitat hutan yang sangat luas, rata-rata suhu udara Kabupaten Nunukan adalah 27,37 oC, tetapi memiliki kelembapan udara yang cukup tinggi dengan rata-rata 84,40 persen.

5.1.3 Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan adalah yang terbanyak kedua di Provinsi Kalimantan Utara. Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 sebanyak 199.090 jiwa. Dibandingkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk di Nunukan telah meningkat 41,36 persen.

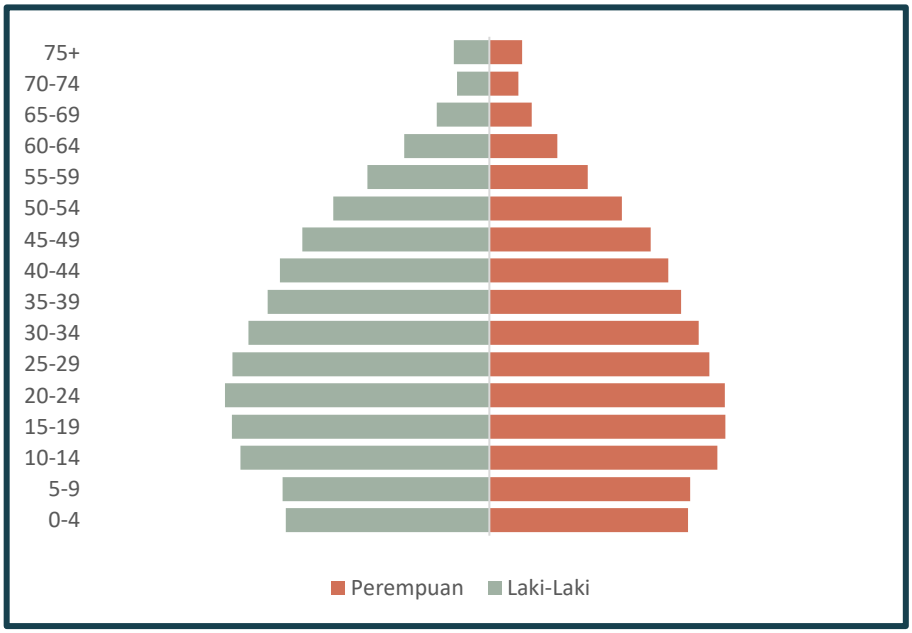
Gambar 5.3 Jumlah Penduduk di Kabupaten Nunukan, 2020-2021



Sumber: BPS Kabupaten Nunukan

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023, jumlah penduduk Kabupaten Nunukan pada 2021 juga mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan tahun 2021 tercatat sebanyak 203.220 jiwa, meningkat 2,78 persen dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan penduduk ini cenderung melambat jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun selama 2010-2020.

Gambar 5.4 Piramida Penduduk Kabupaten Nunukan, 2021



Sumber: BPS Kabupaten Nunukan

Apabila dilihat dari struktur penduduknya, penduduk Kabupaten Nunukan tergolong berstruktur *expansive* yang dapat dilihat dari piramida penduduk dimana jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tua. Persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 24,54 persen, penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif) sebesar 71,16 persen, dan penduduk usia 65 tahun keatas sebesar 4,29 persen. Jika

melihat persentase ini, Kabupaten Nunukan dapat dikatakan sedang mengalami bonus demografi. Walaupun demikian, seiring berjalannya waktu, banyaknya penduduk usia produktif ini akan menuju *ageing population*. Oleh karena itu, momen bonus demografi dengan besarnya jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi harus dioptimalkan.

Dibedakan menurut jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari angka *sex ratio* sebesar 113, artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 113 penduduk laki-laki.

Jika dirinci per kecamatan, kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah kecamatan Nunukan. Walaupun demikian, kepadatan penduduk tertinggi justru pada Kecamatan Sebatik Utara. Jumlah penduduk di Kecamatan Sebatik Utara memang tidak sebanyak di Kecamatan Nunukan, namun wilayahnya yang tidak terlalu luas membuat kepadatan penduduknya tinggi. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Krayan Tengah. Persebaran penduduk di Kabupaten Nunukan memang belum merata karena beberapa faktor, salah satunya geografis.

Di sebagian besar kecamatan, pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 bernilai positif, artinya terjadi peningkatan jumlah peduduk pada kecamatan tersebut. Namun, di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, dan Sebatik Barat, pertumbuhan penduduknya bernilai negatif. Adanya pengurangan jumlah penduduk bisa disebabkan kematian atau adanya migrasi keluar yang lebih besar dibandingkan migrasi masuk.

Tabel 5.2. Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan, 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (2020-2021)	Kepadatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sebatik Utara	8.068	4,715	524,237
Sebatik Tengah	8.540	4,714	178,998
Sebatik Timur	14.670	4,722	374,521
Sebatik	6.680	4,718	130,801
Sebatik Barat	10.801	-1,245	115,804
Nunukan Selatan	22.484	5,572	123,695
Nunukan	65.393	2,398	115,842
Sei Menggaris	10.459	2,395	12,298
Tulin Onsoi	11.217	3,706	7,412
Sebuku	12.266	3,703	7,626
Sembakung	6.675	0,040	3,782
Sembakung Atulai	2.772	0,048	9,981
Lumbis	6.594	0,897	22,720
Lumbis Hulu	778	0,863	1,018
Lumbis Pansiangan	1.856	0,869	1,924
Lumbis Ogong	3.100	0,910	1,903
Krayan Barat	2.931	-0,588	9,540
Krayan Timur	1.590	-0,584	1,249
Krayan	3.443	-0,578	13,536
Krayan Tengah	1.441	1,310	1,445
Krayan Selatan	1.462	1,291	1,923
Kabupaten Nunukan	203.220	2,775	14,264

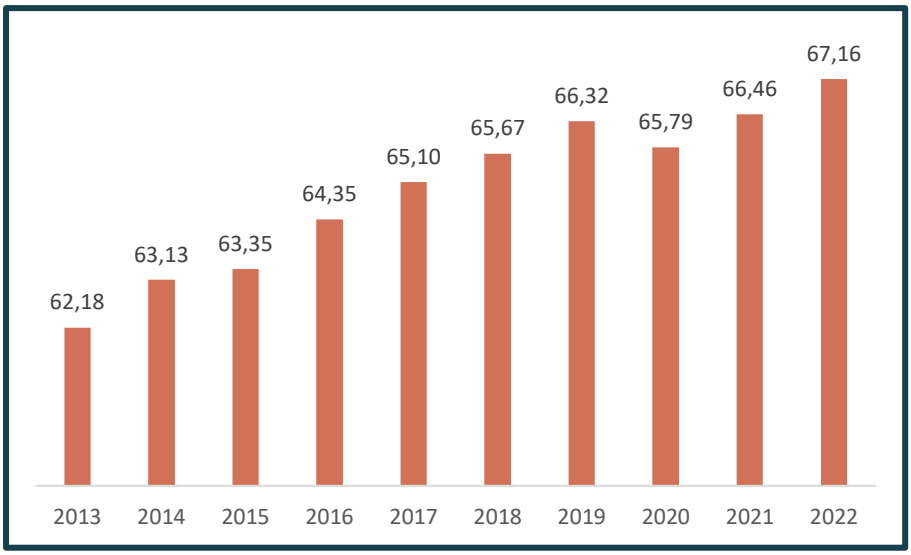
Sumber: BPS Kabupaten Nunukan

5.2 Perkembangan Pembangunan Manusia Kabupaten Nunukan

Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Nunukan juga terus mengalami kemajuan. Walaupun sempat mengalami penurunan pada

2020 akibat terdampak pandemi COVID-19, IPM Kabupaten Nunukan kembali menunjukkan peningkatan mulai tahun 2021. Hal ini seiring dengan pemulihan kinerja perekonomian dan penanganan pandemi COVID-19 yang berjalan baik.

Gambar 5.5 IPM Kabupaten Nunukan, 2013-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada kondisi normal (2013-2019), pembangunan manusia di Kabupaten Nunukan secara rata-rata tumbuh 1,08 persen per tahun, dari 62,18 pada 2013 menjadi 66,32 pada 2019. Ketika virus COVID-19 mulai masuk, IPM Kabupaten Nunukan turun hingga 0,53 persen menjadi 65,79. Selanjutnya, di masa pemulihan ekonomi tahun 2021, IPM Kabupaten Nunukan terus tumbuh hingga kini pada tahun 2022 mencapai 67,16. IPM Kabupaten Nunukan tumbuh 1,05 persen pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021. Angka ini masih di bawah rata-rata pertumbuhan IPM pada kondisi normal sebelum pandemi COVID-19, namun sudah lebih cepat dibandingkan pertumbuhan tahun 2021.

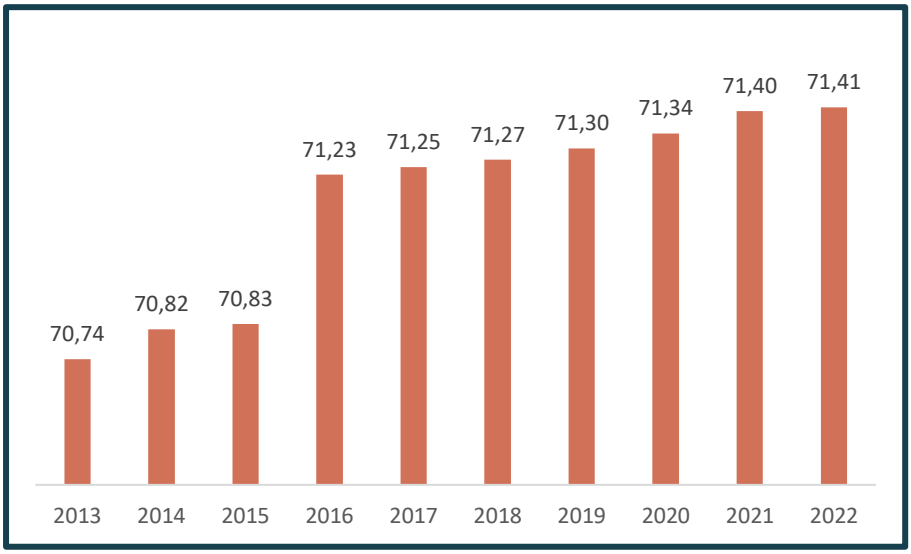
Upaya peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Nunukan, perlu didukung dengan peningkatan pada seluruh komponen penyusunnya, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, indikator di Kabupaten Nunukan hampir selalu yang terrendah. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan percepatan pembangunan manusia pada ketiga dimensi penyusun IPM agar Kabupaten Nunukan mampu mengejar ketertinggalan dari kabupaten/kota lainnya.

5.2.1 Pembangunan Manusia dari Dimensi Kesehatan

Kesehatan menjadi salah satu poin penting dalam pembangunan manusia. Kualitas hidup manusia sangat tergantung dari derajat kesehatannya. Derajat kesehatan dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka mortalitas menunjukkan jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun. Umur Harapan Hidup (UHH) dapat mengindikasikan tingkat kematian yang dilihat dari sisi harapan hidupnya.

UHH Kabupaten Nunukan terus menunjukkan peningkatan selama tahun 2013-2022. Rata-rata pertumbuhan UHH pada periode tersebut sebesar 0,10 persen per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Nunukan semakin membaik. Bayi yang baru lahir memiliki harapan untuk hidup lebih lama.

Gambar 5.6 Umur Harapan Hidup Kabupaten Nunukan (tahun), 2013-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

UHH Kabupaten Nunukan pada tahun 2022 mencapai 71,41 tahun. Dengan demikian, penduduk Kabupaten Nunukan yang lahir pada tahun 2022 memiliki peluang hidup hingga usia 71 tahun 4 bulan.

Angka kesakitan (morbiditas) adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Semakin tinggi angka morbiditas, semakin rendah tingkat derajat kesehatan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 menunjukkan bahwa angka morbiditas di Kabupaten Nunukan sebesar 6,82 persen, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan membaiknya kondisi kesehatan masyarakat. Indikator-indikator kesehatan lain di Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3 Beberapa Indikator Kesehatan Kabupaten Nunukan, 2020-2021

Indikator	Satuan	2020	2021	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	Persen	82,47	93,84	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	Persen	94,29	93,84	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	Persen	72,61	68,74	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	Persen	90,12	85,46	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	Persen	4,94	5,49	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Persen	77,77	75,49	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap	Persen	40,72	55,94	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Indikator	Satuan	2020	2021	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 tahun terahir dengan Berat Badan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Kurang Dari 2,5 Kkg	Persen	21,86	12,04	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Jumlah Kelahiran Hidup		3760	3760	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
Jumlah Kematian Ibu		10	8	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
Jumlah Kematian Bayi		31	46	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
Prevalensi Stunting	Persen	18,51	14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

Tingkat kesehatan masayarakat pada suatu wilayah juga sangat berkaitan dengan sarana prasarana kesehatan serta aksesbilitas terhadap fasilitas kesehatan yang tersedia. Saat ini, di Kabupaten Nunukan hanya tersedia dua rumah sakit, yang berada di Kecamatan Nunukan dan Sebatik. Padahal, wilayah kabupaten Nunukan sangat luas dan akses antar kecamatan pada beberapa wilayah cukup sulit.

Berbeda dengan rumah sakit, untuk puskesmas, sudah tersedia hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Nunukan, kecuali Kecamatan Krayan Tengah, Krayan Timur, Krayan Barat, Lumbis Pansiangan, dan Lumbis Hulu. Puskesmas terbanyak tersedia di Kecamatan Nunukan, terdapat 3 desa di kecamatan tersebut yang mempunyai puskesmas. Walaupun tidak di semua kecamatan tersedia puskesmas, terdapat beberapa unit puskesmas pembantu (pustu) di sejumlah desa pada setiap kecamatan, kecuali Kecamatan Sebatik Utara. Total pustu yang tersedia di Kabupaten Nunukan adalah 75 unit.

Tabel 5.4 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Nunukan, 2020-2021

Kecamatan	Tenaga Kesehatan				
	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sebatik Utara	1	10	7	4	2
Sebatik Tengah	2	16	11	5	2
Sebatik Timur	1	15	15	5	1
Sebatik	7	40	24	8	3
Sebatik Barat	4	14	13	1	1
Nunukan Selatan	4	21	21	4	1
Nunukan	50	199	102	31	8
Sei Menggaris	2	14	16	2	1
Tulin Onsoi	3	13	19	2	2
Sebuku	4	12	22	3	2
Sembakung	1	20	13	2	-
Sembakung Atulai	1	10	7	2	1
Lumbis	1	19	16	2	1

Kecamatan	Tenaga Kesehatan				
	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lumbis Hulu	-	-	-	-	-
Lumbis Pansiangan	-	-	-	-	-
Lumbis Ogong	1	14	12	2	-
Krayan Barat	-	-	-	-	-
Krayan Timur	-	-	-	-	-
Krayan	3	20	23	3	3
Krayan Tengah	-	-	-	-	-
Krayan Selatan	1	8	9	1	2
Kabupaten Nunukan	86	445	330	77	30

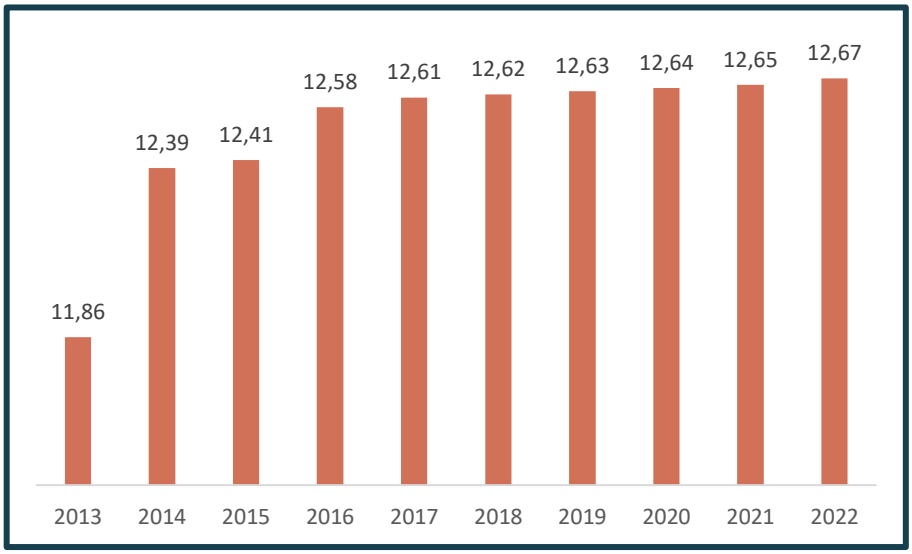
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

Dari sisi tenaga Kesehatan, jumlah tenaga kesehatan yang tersedia pada tahun 2021 cukup banyak. Namun, banyak dari tenaga kesehatan tersebut terpusat di Kecamatan Nunukan. Sementara itu, di kecamatan-kecamatan lain jumlah tenaga kesehatan masih terbatas. Melihat ketimpangan ini, perlu adanya pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan hingga seluruh kecamatan agar kesempatan untuk medapatkan akses kesehatan dapat dirasakan oleh semua penduduk Kabupaten Nunukan tanpa terkecuali.

5.2.2 Pembangunan Manusia dari Dimensi Pendidikan

Upaya pembangunan manusia turut didorong melalui peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan akan memacu kemajuan pada bidang-bidang lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

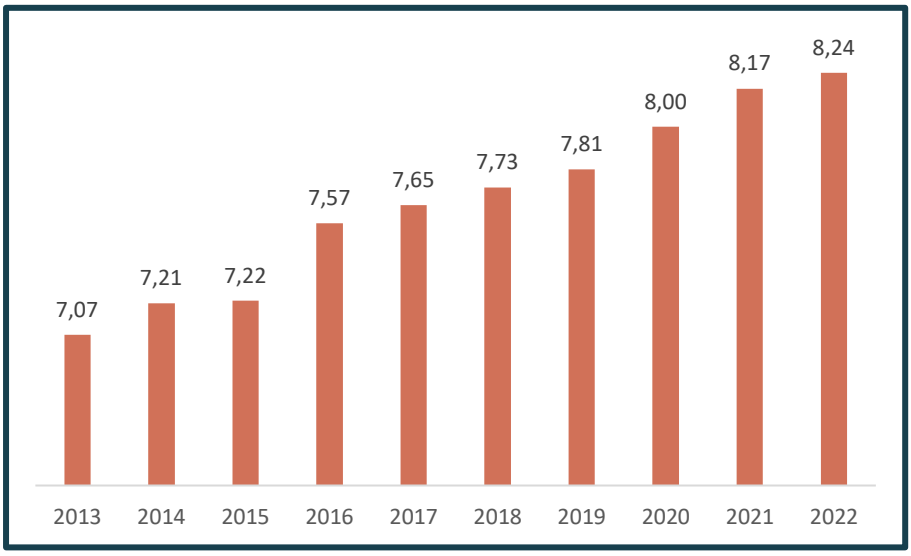
Gambar 5.7 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Nunukan (tahun), 2013-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama periode 2013 hingga 2022, harapan lama sekolah di Kabupaten Nunukan meningkat 0,81 tahun, atau secara rata-rata tumbuh 0,74 persen per tahun. Meningkatnya harapan lama sekolah merupakan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang dapat menikmati bangku sekolah. Pada tahun 2022, harapan lama sekolah di Kabupaten Nunukan telah mencapai 12,67 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA/sederajat.

Gambar 5.8 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nunukan, 2013-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Nunukan rata-rata tumbuh 1,72 persen per tahun selama periode 2013 hingga 2022. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Nunukan yang lebih baik. Pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Nunukan usia 25 tahun ke atas mencapai 8,24 tahun, atau dengan kata lain rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menjalani pendidikan hingga kelas 2 pada jenjang SMP/Sederajat.

Tabel 5.5 Beberapa Indikator Pendidikan Kabupaten Nunukan, 2020-2021

Indikator Pendidikan	Tahun	
	2020	2021
Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
7-12 tahun	98,68	98,43
13-15 tahun	95,39	95,37
16 - 18 tahun	72,14	73,80
Angka Partisipasi Murni (APM)		
SD/Sederajat	90,81	90,79
SMP/Sederajat	78,26	78,50
SMA/Sederajat	59,29	61,46
Angka Partisipasi Kasar (APK)		
SD/Sederajat	98,19	96,77
SMP/Sederajat	106,95	108,27
SMA/Sederajat	79,71	78,41
Persentase Penduduk Menurut Ijazah Tertinggi		
Tidak Punya Ijazah	20,26	15,09
SD/Sederajat	24,36	30,72
SMP/Sederajat	20,93	22,72
SMA/Sederajat	24,96	23,88
Diploma/Sarjana ke atas	9,48	7,59

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Beberapa indikator lainnya untuk menggambarkan kondisi pendidikan antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS merupakan indikator yang mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Semakin tinggi nilai APS menunjukkan semakin banyak penduduk yang dapat menikmati sarana pendidikan. Pada tahun 2021, APS untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 98,43 persen, artinya dari setiap 100 anak usia 7-12 tahun, terdapat sekitar satu anak yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi (*drop out*). APS untuk kelompok umur 13-15 tahun sebesar 95,37 dan kelompok

umur 16-18 tahun sebesar 73,80 persen. Dari ketiga kelompok umur tersebut, terdapat kesenjangan antara APS kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun dengan 16-18 tahun. APS kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun sudah mendekati 100 persen, namun APS kelompok umur 16-18 tahun masih cukup jauh menuju 100 persen.

APM mengindikasikan proporsi anak usia sekolah yang dapat sekolah tepat waktu. Pada tahun 2021, APM tertinggi pada tingkat SD/sederajat sebesar 90,79. APM pada tingkat SMP/sederajat sebesar 78,50 persen dan APM pada tingkat SMA/ sederajat sebesar 61,46 persen.

APK menggambarkan partisipasi penduduk yang sedang menempuh pendidikan tanpa mempertimbangkan usia. Pada tahun 2021, APK untuk tingkat SD/sederajat sebesar 96,77; tingkat SMP/sederajat sebesar 108,27; dan tingkat SMA/sederajat sebesar 78,41. Angka APK yang lebih tinggi daripada APM menunjukkan adanya penduduk yang tidak sekolah tepat waktu.

Jika dicermati kembali, baik APS, APM maupun APK, menunjukkan adanya kecenderungan penurunan setiap jenjang sekolah yang lebih tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait akses pendidikan menengah dan tinggi yang capaiannya belum setinggi pendidikan dasar.

Tabel 5.6 Jumlah Sekolah dan Rasio Murid-Guru Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan, Tahun Ajaran 2021/2022

Kecamatan	Jumlah Sekolah			Rasio Murid-Guru		
	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/ MA/SMK	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/ MA/SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sebatik Utara	3	2	1	11	14	12
Sebatik Tengah	7	2	1	11	12	10
Sebatik Timur	9	3	3	13	15	10
Sebatik	4	3	2	15	18	14
Sebatik Barat	9	2	1	17	14	15
Nunukan Selatan	8	6	5	20	15	15
Nunukan	20	10	9	19	14	13
Sei Menggaris	7	2	1	19	11	9
Tulin Onsoi	9	2	1	16	16	12
Sebuku	12	3	1	15	13	12
Sembakung	16	6	1	6	9	10
Sembakung Atulai	2	-	1	10	-	3
Lumbis	10	2	1	9	17	20
Lumbis Hulu	-	-	-	-	-	-
Lumbis Pansiangan	-	-	-	-	-	-
Lumbis Ogong	10	3	-	7	7	-
Krayan Barat	-	-	-	-	-	-
Krayan Timur	-	-	-	-	-	-
Krayan	21	4	3	3	8	7
Krayan Tengah	-	-	-	-	-	-
Krayan Selatan	6	3	1	4	7	3
Kabupaten Nunukan	153	53	32	12	13	12

Sumber: Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Data Pokok Pendidikan dan Kementerian Agama

Tabel 5.7 Jumlah Guru dan Murid Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan, Tahun Ajaran 2021/2022

Kecamatan	Jumlah Guru			Jumlah Murid		
	SD/MI	SMP/ MTS	SMA/ MA/SMK	SD/MI	SMP/ MTS	SMA/ MA/SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sebatik Utara	56	41	6	621	563	69
Sebatik Tengah	81	27	28	868	317	283
Sebatik Timur	139	44	51	1.838	666	525
Sebatik	54	33	59	803	580	843
Sebatik Barat	84	31	42	1.417	439	638
Nunukan Selatan	119	104	74	2.423	1.509	1.129
Nunukan	368	206	222	6.894	2.940	2.868
Sei Menggaris	65	34	23	1.227	374	213
Tulin Onsoi	98	36	27	1.533	571	322
Sebuku	114	31	27	1.700	404	333
Sembakung	168	57	22	1.035	494	228
Sembakung Atulai	26	-	11	252	-	38
Lumbis	127	36	25	1.109	605	506
Lumbis Hulu	-	-	-	-	-	-
Lumbis Pansiangan	-	-	-	-	-	-
Lumbis Ogong	96	27	-	716	202	-
Krayan Barat	-	-	-	-	-	-
Krayan Timur	-	-	-	-	-	-
Krayan	219	55	63	758	445	436
Krayan Tengah	-	-	-	-	-	-
Krayan Selatan	65	27	20	277	176	67
Kabupaten Nunukan	1.879	789	700	23.471	10.285	8.498

Sumber: Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Data Pokok Pendidikan dan Kementerian Agama

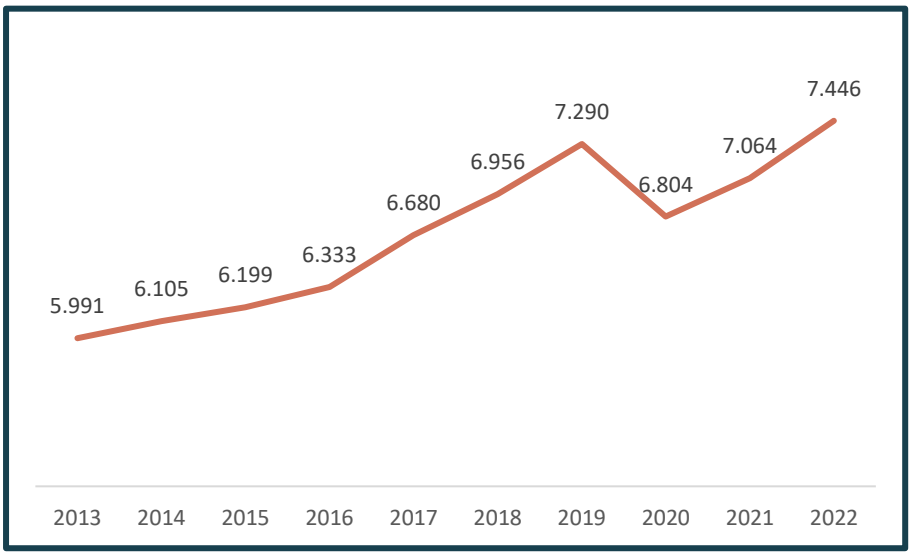
Dari sisi sarana prasarana pendidikan, pada tahun ajaran 2021/2022, terdapat 279 sekolah di Kabupaten Nunukan, yang terdiri dari 41 TK/RA, 153 SD/MI, 53 SMP/MTs, 32 SMA/MA/SMK. Kecamatan dengan jumlah sekolah terbanyak adalah Kecamatan Nunukan. Sementara itu, di beberapa kecamatan, seperti Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Krayan Barat, dan Krayan Timur tidak tersedia sekolah pada semua jenjang pendidikan.

Secara umum, jika melihat jumlah guru dan murid di Kabupaten Nunukan, guru yang tersedia telah mencukupi secara kuantitas. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan, pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Sementara itu, di Kabupaten Nunukan, rata-rata 1 guru menangani 12 murid pada jenjang SD/MI, 13 murid pada jenjang SMP/MTS, dan 12 murid pada jenjang SMA/MA/SMK. Walaupun demikian, untuk mendukung pembelajaran, perlu dipastikan kembali apakah kapasitas guru yang tersedia sudah memenuhi atau sesuai kebutuhan.

5.2.3 Pembangunan Manusia dari Dimensi Standar Hidup Layak

Dimesi ketiga dari komponen IPM adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh indikator pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, pengeluaran per kapita riil yang disesuikan mulai terus tumbuh sejak 2021 hingga 2022 seiring membaiknya perekonomian di Kabupaten Nunukan.

Gambar 5.9 Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Nunukan (ribu rupiah), 2013-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

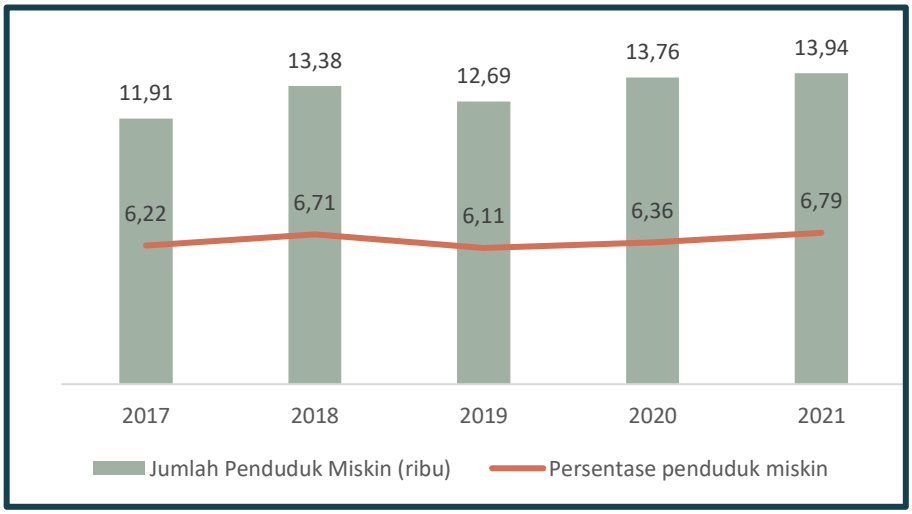
Pada tahun 2022, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan penduduk Kabupaten Nunukan mencapai 7,446 juta rupiah per tahun, meningkat 5,41 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan pada saat sebelum pandemi COVID-19 tahun 2019.

Pengeluaran per kapita masyarakat berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini juga berkaitan dengan kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Selama lima tahun terakhir, kemiskinan di Kabupaten Nunukan masih berada pada kisaran 6-7 persen. Angka kemiskinan semakin meningkat ketika pandemi COVID-19 mulai menyebar dan menyebabkan

lesunya perekonomian. Akibatnya, pada tahun 2021, angka kemiskinan Kabupaten Nunukan naik hingga 6,79 persen.

Gambar 5.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (persen) di Kabupaten Nunukan, 2017-2021



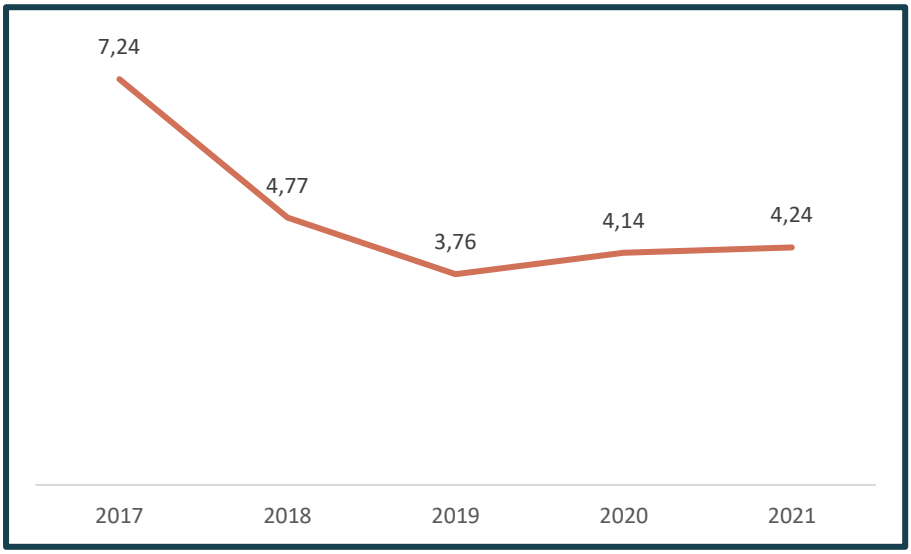
Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret

Walaupun angka kemiskinan meningkat, namun ketimpangan pengeluaran per kapita penduduk yang diukur dengan indikator koefisien gini cenderung mengalami penurunan. Koefisien gini merupakan ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita di suatu daerah. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana Ketika koefisien gini bernilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna, sebaliknya Ketika koefisien gini bernilai 1 menunjukkan terjadinya ketimpangan sempurna. Koefisien gini Kabupaten Nunukan pada 2021 sebesar 0,261.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka yang dapat ditekan hingga 3,76 persen pada 2019, kembali menunjukkan kenaikan pada

2020 dan 2021 akibat terdampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan sejumlah tenaga kerja mengalami PHK, diberhentikan sementara, atau pengurangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka kabupaten Nunukan pada 2021 mencapai 4,24 persen.

Gambar 5.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) di Kabupaten Nunukan, 2017-2021



Sumber: BPS, Survei Ketenagakerjaan Nasional (SAKERNAS) Agustus

Jika melihat kinerja perekonomian Kabupaten Nunukan, pada 2020, ekonomi Kabupaten Nunukan sempat terkontraksi 0,93 persen. Selanjutnya, ekonomi mulai tumbuh hingga 4,07 persen pada 2021. Namun, ekonomi pada 2021 belum sepenuhnya pulih. Seiring upaya pemulihan yang terus digencarkan, diharapkan tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat kembali ditekan. Lebih jauh, kesejahteraan masyarakat dapat membaik sehingga daya beli masyarakat pun akan ikut meningkat.

5.3 *Issue-Issue* Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil *indepth study* dengan sejumlah OPD Kabupaten Nunukan, beberapa *issue-issue* terkait dimensi pembangunan manusia diantaranya:

1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat
    a. Kondisi geografis yang menyebabkan sulitnya akses antar wilayah, sementara fasilitas kesehatan yang tersedia, seperti rumah sakit hanya tersedia di Kecamatan Nunukan. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah perbatasan atau wilayah yang jauh dari Kecamatan Nunukan kesulitan mengakses pelayanan kesehatan.
    b. Jumlah tenaga kesehatan juga masih terbatas dan belum merata. Kurangnya tenaga kesehatan disebabkan kurangnya minat tenaga kesehatan untuk bekerja di Kabupaten Nunukan karena faktor geografis serta keterbatasan sarana dan prasarana, terutama pada kecamatan-kecamatan dengan akses yang sulit.
    c. Masih terbatasnya alat-alat kesehatan yang tersedia. Beberapa obat juga sulit untuk diperoleh. Akibatnya, untuk beberapa kasus, pasien harus dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini menjadi masalah besar untuk pasien yang membutuhkan pertolongan segera. Pasien dapat terancam tidak tertolong.
2. Dimensi Pengetahuan
    a. Seperti halnya pada dimensi kesehatan, faktor geografis juga menjadi permasalahan dalam pendidikan di Kabupaten Nunukan. Sulitnya kondisi geografis

menyebakan akses ke beberapa wilayah cukup sulit untuk dijangkau. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan seperti kesulitan pembangunan infrastruktur, kesulitan dalam mendatangkan tenaga pengajar, terhambatnya sosialisasi pendidikan ke masyarakat, dan sebagainya.

b. Salah satu usaha yang berkembang di masyarakat adalah usaha rumput laut. Rumput laut menjadi produk unggulan di Kabupaten Nunukan. Usaha rumput laut yang menjanjikan ini membuat sebagian masyarakat atau anak-anak usia sekolah memilih untuk bekerja daripada belajar di sekolah. Akhirnya, partisipasi sekolah penduduk usia sekolah menurun. Angka putus sekolah pun rawan meningkat.

c. Banyaknya pernikahan pada usia dini juga menjadi faktor penghambat pendidikan. Persentase perempuan yang pernah kawin berumur 10-18 tahun di Kabupaten Nunukan sebesar 34,88 persen (Susenas, Maret 2021) merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara. Umumnya, mereka yang telah melakukan pernikahan pada usia dini memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Dimensi Standar Hidup Layak

   Rendahnya konsumsi masyarakat karena harga yang tinggi dan kurangnya ketersediaan barang. Rendahnya konsumsi masyarakat membuat perputaran uang dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Nunukan menjadi lesu.

Sebagai tindak lanjut dari *issue-issue* di atas, perlu disusun program yang tepat untuk dapat mewujudkan percepatan pembangunan manusia di Kabupaten Nunukan.

4.4 Simulasi dalam Penyusunan Target Perencanaan Pembangunan Manusia

Dengan capaian IPM tahun 2022, status pembangunan manusia di Kabupaten Nunukan masih tetap berada di level "sedang". Walaupun demikian, melihat kecepatan IPM selama dua tahun terakhir, memberikan sinyal positif pembangunan manusia untuk tahun-tahun selanjutnya.

Gambar 5.12 Pertumbuhan IPM Kabupaten Nunukan (persen), 2014-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama tahun 2014-2022, IPM Kabupaten Nunukan selalu tumbuh positif, kecuali pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Pertumbuhan IPM

Kabupaten Nunukan sempat beberapa kali melambat pada 2015, 2017, dan 2018. Secara rata-rata, pada periode sebelum pandemi COVID-19 (2014-2019) IPM Kabupaten Nunukan tumbuh 1,08 persen per tahun. Selanjutnya, di masa pemulihan ekonomi, tahun 2021 dan 2022, IPM rata-rata tumbuh 1,04 persen per tahun.

Melihat pertumbuhan IPM Kabupaten Nunukan dari tahun ke tahun selama sepuluh tahun terakhir, jika pertumbuhannya tetap konsisten terjaga setidaknya seperti saat sebelum pandemi COVID-19, status pembangunan manusia di Kabupaten Nunukan diharapkan sudah berubah menjadi tinggi pada tahun 2025. Simulasi target IPM Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8 Estimasi Target IPM Kabupaten Nunukan, 2023-2026

IPM 2022	Pertumbuhan per tahun	Estimasi IPM			
		2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
67,16	0,70	67,63	68,10	68,58	69,06
	0,80	67,70	68,24	68,78	69,34
	0,90	67,76	68,37	68,99	69,61
	1,00	67,83	68,51	69,20	69,89
	1,08	67,89	68,62	69,36	70,11
	1,10	67,90	68,65	69,40	70,16
	1,20	67,97	68,78	69,61	70,44
	1,30	68,03	68,92	69,81	70,72
	1,40	68,10	69,05	70,02	71,00
	1,50	68,17	69,19	70,23	71,28
Target RPJMD Kabupaten Nunukan		69,10	70,24	71,40	72,58

Catatan: *rata-rata pertumbuhan IPM sebelum masa pandemi COVID-19

: IPM dengan status tinggi

: IPM dengan status sedang

Dengan capaian IPM tahun 2022, status pembagunan manusia di Kabupaten Nunukan masih tetap berada di level “sedang”. Walaupun demikian, melihat pertumbuhan IPM Kabupaten Nunukan dari tahun ke tahun selama sepuluh tahun terakhir, jika pertumbuhannya tetap konsisten minimal sama seperti pertumbuhan IPM sebelum terjadi pandemi COVID-19, status pembangunan manusia di Kabupaten Nunukan diharapkan sudah berubah menjadi tinggi pada tahun 2026.

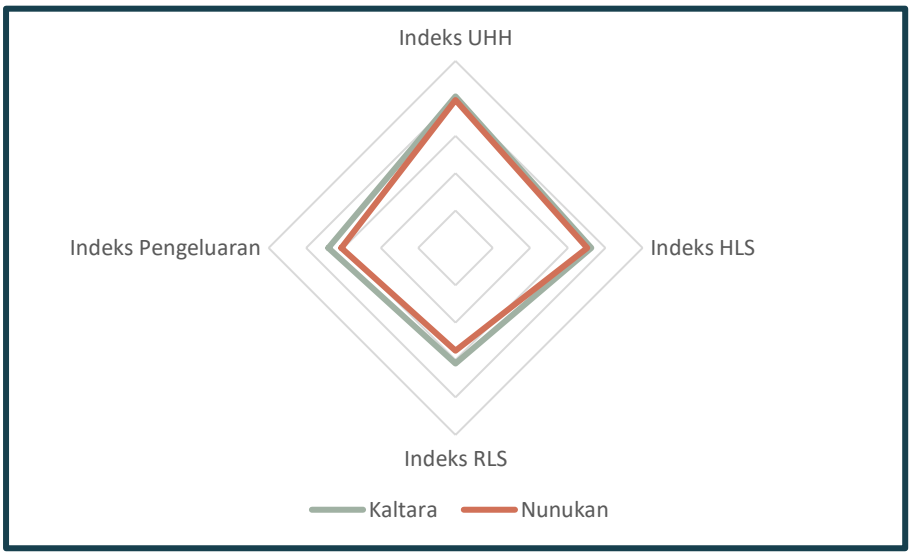
Dari tabel 5.8, tersedia estimasi target IPM dengan berbagai simulasi pertumbuhan per tahun. Semakin cepat pertumbuhan IPM, semakin cepat pula IPM Kabupaten Nunukan menuju status “Tinggi”. Saat ini, target yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Nunukan periode 2021-2026, IPM Kabupaten Nunukan ditargetkan menjadi tinggi pada 2024. Namun, melihat IPM tahun 2022 yang telah dirilis, dibutuhkan pertumbuhan IPM yang cukup tinggi (lebih dari 2 persen per tahun) untuk dapat mencapai target tersebut. Sementara, tren pertumbuhan IPM selama ini, pertumbuhan tertinggi yang pernah dicapai sebesar 1,57 persen.

Upaya peningkatan pembangunan manusia memerlukan sinergi dari ketiga dimensi penyusunnya, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Ketiganya harus seimbang untuk mencapai pembangunan manusia yang optimal. Hal ini karena penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan rata-rata geometrik dari ketiga indeks dimensi penyusunnya. Dengan penghitungan ini, kekurangan pada salah satu indeks, tidak dapat disubstitusi melalui indeks lain yang tinggi. Oleh karena itu, apabila hanya salah satu dimensi yang memiliki nilai tinggi, sementara dimensi lain rendah, maka IPM pun tidak akan optimal.

Gambar 5.13 menunjukkan indeks untuk setiap indikator penyusun IPM Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan. Indeks setiap

indikator, baik UHH, HLS, RLS, maupun pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Nunukan selalu lebih rendah dibandingkan indeks Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 5.13 Indeks Indikator Komponen IPM Kabupaten Nunukan, 2022



Sumber: BPS, diolah

Jika melihat nilai masing-masing indeks di Kabupaten Nunukan, terlihat masih adanya kesenjangan. Indeks UHH, sebesar 0,791 merupakan yang tertinggi dibandingkan indeks indikator lainnya. Dari dimensi pengetahuan, indeks HLS sebesar 0,704 dan indeks RLS sebesar 0,549. Indeks RLS merupakan yang terrendah. Sementara itu, indeks pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebesar 0,611.

Dari keempat indeks indikator penyusun IPM, fokus percepatan IPM dapat diutamakan melalui dimensi pengetahuan dan standar hidup layak. Walaupun demikian, dimensi kesehatan juga tetap harus diperhatikan.

Pada Tabel 5.9 tertera penghitungan target untuk dimensi standar hidup layak dengan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Target IPM menggunakan hasil simulasi dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,08 persen, sementara untuk indikator UHH, HLS, dan RLS, menggunakan target RPJMD yang ditetapkan Kabupaten Nunukan.

Tabel 5.9 Estimasi Target IPM Kabupaten Nunukan beserta Komponennya,, 2023-2026

Uraian	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Target IPM	67,89	68,62	69,36	70,11
Target UHH	71,42	71,45	71,48	71,51
Target HLS	12,94	13,04	13,14	13,24
Target RLS	8,3	8,4	8,5	9,25
Target Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)	8.707	9.132	9.591	9.331

Sesuai dengan tabel 5.9, jika pemerintah ingin mencapai level pembangunan manusia “tinggi” di Kabupaten Nunukan pada 2026, dengan menggunakan target-target indikator yang telah ditetapkan, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan harus ditingkatkan hingga 9,33 juta rupiah per tahun pada 2026. Perlu peningkatan sebesar 25,31 persen dari pengeluaran per kapita disesuaikan pada 2022.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Secara umum, pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Utara selama 2013-2022 terus menunjukkan kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia sempat mengalami penurunan pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun, mulai tahun 2021, IPM kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 71,83 pada 2022.
2. Status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Utara termasuk dalam kategori "Tinggi". Namun, masih terdapat dua kabupaten/kota yang masih berada dalam kategori "Sedang", yaitu Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan.
3. Status IPM di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan dapat ditingkatkan menjadi katagori tinggi sehingga menjadi pengungkit utama dalam peningkatan IPM Provinsi Kalimantan Utara.
4. Seperti halnya di Provinsi Kalimantan Utara, pembangunan manusia di Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan juga senantiasa meningkat. IPM tahun 2022 di Kabupaten Tana Tidung sebesar 68,60 dan di Kabupaten Nunukan sebesar 67,16.
5. Upaya peningkatan pembangunan manusia perlu didukung dengan peningkatan pada seluruh komponen penyusunnya, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan. Komponen UHH, HLS, dan RLS, di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan, selalu menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Sementara itu, komponen pengeluaran riil per

kapita yang disesuaikan, mengalami penurunan pada 2020, dan kembali meningkat pada tahun-tahun selanjutnya.

6. Di Kabupaten Tana Tidung, permasalahan-permasalahan utama terkait pembangunan manusia adalah faktor geografis dan aksesbilitas, pemerataan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, serta harga-harga komoditas yang tinggi sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan penyusunan program yang tepat seperti:
    - Percepatan pembukaan isolasi daerah sulit dengan membangun infrastuktur jalan
    - Pemberian keleluasaan mendapatkan kredit investasi dan usaha sesuai dengan rencana anggaran biaya yang diajukan oleh kreditur
    - Penyediaan fasilitas dan insentif yang rasional kepada tenaga pendidik dan kesehatan yang bertugas didaerah sulit.
7. Di Kabupaten Nunukan, faktor geografis dan aksesbilitas juga menjadi kendala utama dalam peningkatan pembangunan manusia. Faktor lainnya, yaitu pernikahan usia dini dan anak-anak yang lebih memilih untuk bekerja (usaha rumput laut) dibandingkan melanjutkan pendidikan. Persentase perempuan yang pernah kawin berumur 10-18 tahun di Kabupaten Nunukan sebesar 34,88 persen (Susenas, Maret 2021) merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara. Umumnya, mereka yang telah melakukan pernikahan pada usia dini memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Diamati secara rinci, usaha rumput laut yang menjanjikan membuat sebagian masyarakat atau anak-anak usia sekolah memilih untuk bekerja

daripada belajar di sekolah. Akhirnya, partisipasi sekolah penduduk usia sekolah menurun. Angka putus sekolah pun rawan meningkat. Dari hasil pengamatan ini perlu disusun program sosialisasi yang lebih massif dan terus menerus dan dilengkapi dengan penetapan area sebagai Zona Eklusif Bebas Pekerja Anak (ZEBPA).

8. Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan rata-rata geometrik dari ketiga indeks dimensi penyusunnya. Dengan penghitungan ini, kekurangan pada salah satu indeks, tidak dapat disubstitusi melalui indeks lain yang tinggi. Oleh karena itu, apabila hanya salah satu dimensi yang memiliki nilai tinggi, sementara dimensi lain rendah, maka IPM pun tidak optimal.
9. Jika dilihat dari besaran indeks masing-masing indikator penyusun IPM, indikator yang paling rendah, baik di Kabupaten Tana Tidung maupun Kabupaten Nunukan adalah indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan. Dengan demikian, perlu disusun program yang tepat, terutama berkaitan dengan indikator rata-rata lama sekolah dan pegeluaran riil per kapita yang disesuaikan untuk mendorong terjadinya percepatan pembangunan manusia di kedua kabupaten agar dapat mengejar ketertinggalannya dari kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Utara.
10. Untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah bagi penduduk yang usianya melebihi batas usia sekolah, dapat dihimbau untuk mengikuti kejar paket seperti paket (A,B, dan C) dengan menyesuaikan peraturan yang berlaku sebagai kegiatan internal dalam dunia pendidikan.
11. Berkenaan dengan komponen standar hidup layak, indikator tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten

Nunukan relatif ideal untuk sebuah wilayah kabupaten, dimana tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4-5 persen. Rendahnya angka pengangguran mengindikasikan banyaknya penduduk yang bekerja. Penduduk yang berkerja adalah penopang pendapatan yang pada gilirannya akan menciptakan pengeluaran perkapita. Pendapatan yang tinggi berdampak pada pengeluaran yang tinggi pula. Dengan demikian, program yang perlu disusun untuk mendorong pengeluaran atau daya beli masyarakat adalah regulasi balas jasa faktor produksi oleh perusahaan dan pelaku ekonomi, serta pengawasan di bidang ketenagakerjaan.

12. Peningkatan pembangunan manusia bersifat investasi jangka panjang. Oleh karena itu, untuk melihat hasil dari program-program yang dijalankan pemerintah secara optimal perlu waktu beberapa tahun kedepan.
13. Peringkat IPM bukan penentu kualitas, yang terpenting adalah bagaimana status pembangunan manusia yang dapat dicapai. Jika melihat tren kecepatan pembangunan manusia selama ini, status IPM Kabupaten Tana Tidung diharapkan dapat meningkat menjadi "Tinggi" pada 2024, sedangkan di Kabupaten Nunukan pada 2026.